



KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR



RENCANA STRATEGIS

KANWIL KEMENAG PROV. JATIM
TAHUN 2025-2029



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 954 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA
TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.

; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 – 2029.**

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:
- Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
 - Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
 - Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 10 Desember 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



Akhmad Sruji Bahtiar

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 954 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan analisis ilmiah dan data empiris untuk menghasilkan perencanaan yang rasional, terukur, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program kerja Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta kerangka pembangunan nasional dan sektoral juga selaras dengan visi, misi dan proram kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Secara yuridis penyusunan Renstra ini mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, keterkaitan antara Renstra dan RKA-KL dengan Perjanjian Kinerja dan laporan Kinerja yaitu setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran serta mencantumkan Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja berdasarkan Rencana Strategis satuan kerja serta Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Dari dasar Hukum tersebut, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja saling berkaitan. Kedua dokumen menjadi dasar kinerja pegawai yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk mewujudkannya, pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi Ekspektasi dengan memperhatikan pada Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja.

Dengan landasan pendekatan teknokratik ini, Renstra 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen yang efektif untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur secara lebih terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

Pada kondisi umum ini menjelaskan dua hal. Yang pertama menjelaskan Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebelumnya. Dan yang kedua memaparkan Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan yang ketiga menjelaskan tentang Aspirasi dan Isu Strategis di Lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

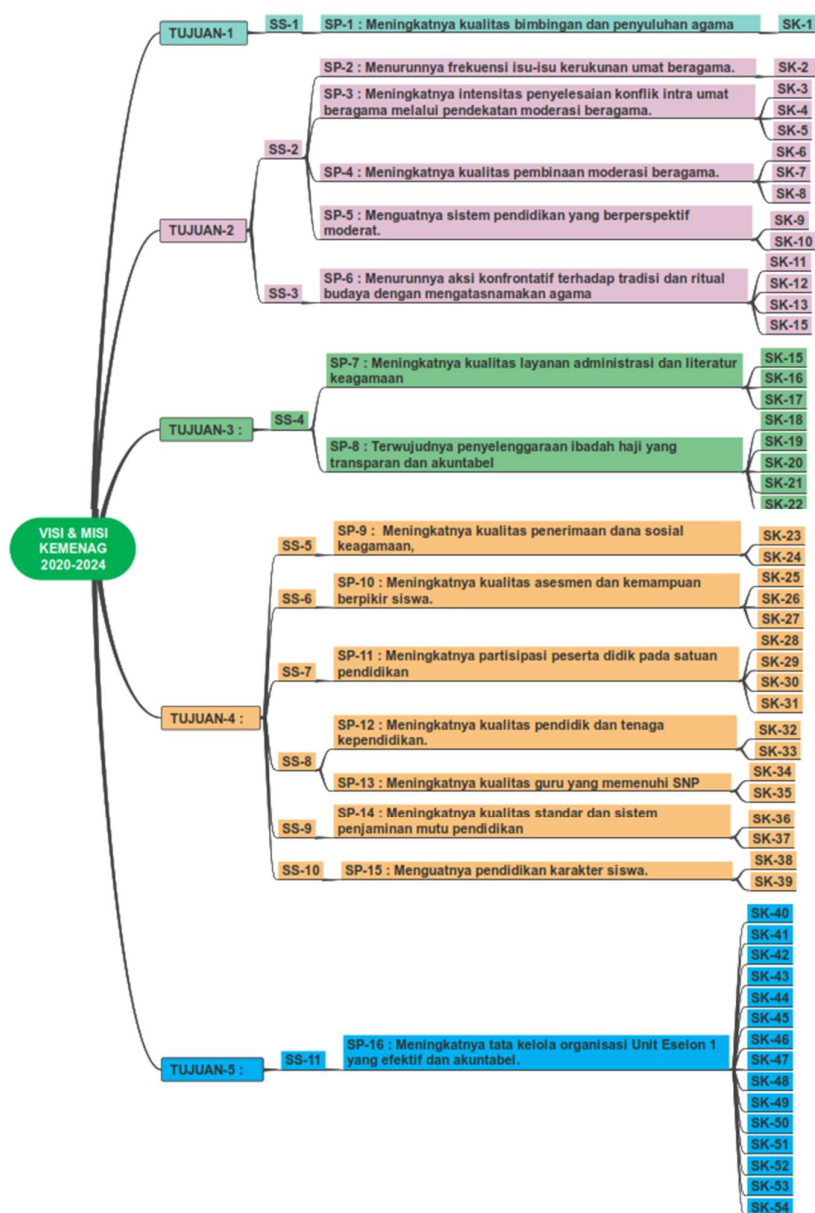
1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Strategis periode tahun 2020 - 2024 telah menetapkan 54 Sasaran Kegiatan (SK) dan 161 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) serta Hasil

Evaluasi Pelaksanaannya dalam rangka ikut mewujudkan 15 (lima belas) Sasaran Program.

Untuk menggambarkan keterkaitan kinerja pada Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mulai : Visi, Misi, Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), Sasaran Kegiatan (SK) sampai pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dapat dilihat pada diagram. Diagram dimaksud lebih menekankan penggambaran alur capaian IKSK ke SK dalam rangka ikut mewujudkan Sasaran Program (SP). Sebagaimana diagram dibawah ini :

Diagram : 1
Visi – Misi – Tujuan – Sasaran – Indikator



Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa sasaran kegiatan mendukung perwujudan realisasi Sasaran Program diatasnya, selanjutnya mendukung perwujudan realisasi sasaran strategis, tujuan sampai pada misi dan puncaknya sebagai ikut mewujudkan visi yang ditetapkan. Selama lima tahun terakhir, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan 53 sasaran kegiatan dan 155 indikator kinerja. Ruang lingkup kerja yang luas ini mencakup hampir seluruh aspek kehidupan keagamaan masyarakat: mulai dari pembinaan umat, penguatan lembaga pendidikan, peningkatan kualitas guru, pengelolaan zakat dan wakaf, pelayanan keluarga melalui KUA, hingga tata kelola organisasi. Capaian dari seluruh indikator ini memperlihatkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020 capaian berada di angka 98%, kemudian menurun pada 2021 menjadi 94% akibat pandemi, naik lagi pada 2022 dengan capaian 97,46%, melonjak pada 2023 hingga 101,20%, dan ditutup dengan 102,11% pada 2024. Jika dihitung rata-rata selama lima tahun, capaian kinerja berada di angka 98,55%. Angka ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program sekaligus adaptasi yang baik terhadap perubahan kondisi.

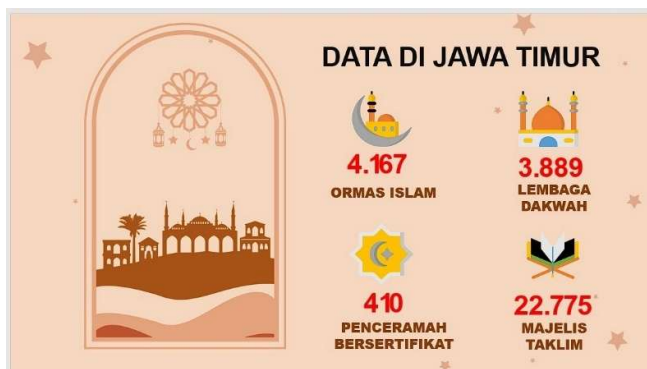
1. Mewujudkan Sasaran Progam Pertama. (SP-1) : Meningkatkan kualitas bimbingan dan penyuluhan agama.

Untuk mendukung dan mewujudkan Sasaran Program pertama tersebut Kanwil Kemenag Prov. Jatim telah menetapkan dan merealisasikan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya dengan target dan capaian mulai tahun 2020 sampai dengan 2024, sebagaimana akumulasi data sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA2 TARGET 2020-2024	RATA2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1. Nilai kinerja penyuluh agama	Nilai	88,00	96,10	109,20	Penais Zawa, semua Bimas, Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Persentase penyuluh agama yang dibina	%	56,38	55,99	99,31	
		3. Jumlah penyar agama yang dibina kompetensi	Orang	64,40	60,60	94,10	
		4. Jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan	Kelompok	1789,40	1736,80	97,06	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					99,92	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Bidang penyuluhan agama menempati peran penting karena menyangkut hubungan langsung dengan masyarakat. Penyuluh agama, baik yang berstatus PNS maupun non-PNS, menjadi jembatan utama antara



pemerintah dan umat. Indikator nilai kinerja penyuluh yang ditargetkan pada angka 88 berhasil terlampaui, dengan capaian rata-rata 96,1 atau 109,2% dari target. Dari hasil

koordinasi dengan Bidang Penerangan Agama Islam dan Zakat Wakaf, Menggunakan Instrumen Monitoring terkait tugas dan fungsi penyuluh di kelompok binaan, jumlah kelompok sasaran binaan dan jumlah umat yang dilayani dengan dengan nilai kinerja rata-rata penyuluh adalah : 85 (Baik).

Hampir seluruh penyuluh telah mendapatkan pembinaan, dengan capaian 99,3%, sementara indikator pembinaan penyiar agama mencapai 94,1%. Dengan capaian tersebut, dapat dikatakan bahwa tenaga penyuluh telah menjalankan peran strategisnya dengan baik. Ke depan, penyuluhan agama berpeluang lebih efektif bila diarahkan pada ranah digital. Penyuluh dapat memanfaatkan media sosial, video pendek, podcast, atau platform daring lain untuk menyampaikan pesan moderasi beragama yang relevan bagi generasi muda. Data Jumlah Penyuluh Agama Agama Islam Tahun 2025 se-Provinsi Jawa Timur dari Unsur PNS sebanyak : 454 penyuluh, dari Unsur PPP sebanyak 2.423 penyuluh. Dari data jumlah Penyuluh Agama Islam tersebut didapatkan Rasio Penyuluh Agama Dengan Umat sebesar 1 : 1500. Sedangkan Rasio Penyuluh Agama Dengan Kelompok Sasaran Bimbingan Penyuluh sebesar 1 : 193. Adapun materi penyuluhan terhadap umat terdiri dari : *Pertama*, Materi Dasar. Materi ini memberikan landasan kebijakan dan prinsip utama bagi penceramah, dengan sub pembahasan Kebijakan Pemerintah: Terkait dakwah dan kehidupan umat beragama di Indonesia. Pengarusutamaan Moderasi Beragama: Penekanan pada moderasi dalam beragama. *Kedua*, Materi Inti, materi ini fokus pada

wawasan kebangsaan, isu keagamaan kontemporer, dan strategi dakwah: Wawasan Keindonesiaan, Ketahanan Nasional, Relasi Agama, Negara, dan Budaya, Isu Aktual Keagamaan, Literasi Media Digital dalam Dakwah:



Penggunaan teknologi digital dalam penyebaran dakwah, Aksi Terorisme Dunia dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, dan materi : Strategi Dakwah di Era Milenial. *Ketiga*, Materi Penunjang, berisi Materi

ini merupakan bagian dari evaluasi kompetensi peserta, dan terakhir Pre Test: Tes yang dilakukan sebelum pelaksanaan seminar dan dialog dan Post Test: Tes yang dilakukan sesudah pelaksanaan seminar dan dialog dan Ujian Menulis Ayat Al-Qur'an.

Dengan demikian Capaian Sasaran Kegiatan Pertama : Meningkatnya kualitas penyuluhan agama, yang didukung empat IKS K dengan nilai rata-rata realisasi dalam prosentase : 99,92%. Dengan capaian ini Sasaran Program pertama : Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama bisa diwujudkan.

2. Mewujudkan Sasaran Progam Kedua. (SP-2) :Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Orang	273,20	320,20	117,20	
		3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Lokasi	2,80	2,80	100,00	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS K / Capaian SK- :						105,73	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Program kerukunan umat beragama juga memperlihatkan hasil yang kuat. Jumlah aktor kerukunan yang dibina melebihi target dengan capaian 117,2%. Desa sadar kerukunan terealisasi penuh sesuai target, rata-rata 2,8 desa per tahun. Forum dialog antarumat beragama bahkan mencapai

156% dari target, dengan rata-rata lima forum per tahun, sedangkan indikator pembinaan lembaga keagamaan mencapai 120%. Capaian-capaian ini tidak hanya menunjukkan pemenuhan target, tetapi juga memperlihatkan antusiasme masyarakat. Dialog lintas iman semakin diterima sebagai sarana efektif untuk membangun harmoni. Tantangan ke depan adalah memperluas tema dialog agar lebih relevan dengan isu-isu sosial kontemporer seperti kesehatan masyarakat, literasi digital, dan pelestarian lingkungan.

Untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran hak beragama dan Konflik Keagamaan, dilaksanakan kegiatan kegiatan yang ditindaklanjuti sebagai berikut :

- Kampanye Kerukunan Umat Beragama, peserta dari para Relawan KUB se-Jawa Timur baik dari Tokoh Masyarakat, ASN maupun Ormas.
- Konsolidasi Program Kerukunan Umat Beragama, peserta terdiri dari Pokja Kerukunan (Pokjawas MB, Pokjaluh MB, dan Pokja KKG/MGMP MB) dan ASN Kanwil.
- Dialog Kerukunan Lintas Agama, peserta terdiri dari ASN Kanwil dan Tokoh Agama di Lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa timur.
- Pembinaan Harmony Umat Beragama Jawa Timur, peserta terdiri dari Kepala Kankemenag se Jawa Timur, Ketua FKUB se Jawa Timur, Pimpinan Ormas Keagamaan se Jawa Timur dan ASN Kanwil, tempat pelaksanaan di Rumah Ibadah 6 Agama Royal Residence Lakarsantri Surabaya. Sebagai narasumber adalah Bapak Menteri Agama RI, Gubernur Jawa Timur dan Walikota Surabaya.
- Rapat Koordinasi dan FGD dengan Pokja Kerukunan (Pokjawas MB, Pokjaluh MB, dan Pokja KKG/MGMP MB), peserta terdiri dari perwakilan pokja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Lomba Tulis Cerpen Anak Harmoni, acara ini dilaksanakan di Kanwil Kementerian Agama secara online, peserta lomba cerpen anak harmony mulai dari tingkat SMP sederajat, SMA sederajat serta Pondok Pesantren.

- Rapat Koordinasi Lintas Sektoral, peserta terdiri dari Ketua FKUB Kabupaten/Kota, Ketua FKUB Provinsi dan Pengurus serta ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Adapun Jumlah Desa/Kelurahan Sadar Kerukunan di Jawa Timur mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2025 sebanyak 20 Desa/Kelurahan, dengan data per-tahun sebagai berikut :

NO	NAMA DESA & ALAMAT	SURAT KEPUTUSAN		
		NOMOR	TANGGAL	PENANDATANGAN
1	Dusun Ngepoh Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang	4324 Tahun 2017	04 Agustus 2017	Kakanwil SAMSUL BAHRI
2	Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi	4003 Tahun 2018	22 Juni 2018	Kakanwil SAMSUL BAHRI
3	Desa Pabian Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep	4003 Tahun 2018	22 Juni 2018	Kakanwil SAMSUL BAHRI
4	Desa Labani (Lebani Waras) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	923 Tahun 2019	10 Juni 2019	Plt. Kakanwil MOCH. AMIN MAHFUD
5	Desa Sumurgempol Kelurahan Kingking Kabupaten Tuban	923 Tahun 2019	10 Juni 2019	Plt. Kakanwil MOCH. AMIN MAHFUD
6	Desa Pakisaji Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang	923 Tahun 2019	10 Juni 2019	Plt. Kakanwil MOCH. AMIN MAHFUD
7	Kelurahan Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun	923 Tahun 2019	10 Juni 2019	Plt. Kakanwil MOCH. AMIN MAHFUD
8	Desa Poncol Kec. Poncol Kabupaten Magetan	923 Tahun 2019	10 Juni 2019	Plt. Kakanwil MOCH. AMIN MAHFUD
9	Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo	923 Tahun 2019	10 Juni 2019	Plt. Kakanwil MOCH. AMIN MAHFUD
10	Kelurahan Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu	607 Tahun 2020	21 Juli 2020	Kakanwil AHMAD ZAYADI
11	Desa Senduro Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang	607 Tahun 2020	21 Juli 2020	Kakanwil AHMAD ZAYADI
12	Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo	607 Tahun 2020	21 Juli 2020	Kakanwil AHMAD ZAYADI
13	Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan	272 Tahun 2021	22 April 2021	Kakanwil AHMAD ZAYADI
14	Desa Sekaran Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri	272 Tahun 2021	22 April 2021	Kakanwil AHMAD ZAYADI
15	Desa Pacet Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto	272 Tahun 2021	22 April 2021	Kakanwil AHMAD ZAYADI
16	Desa Ngadiwono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan	272 Tahun 2021	22 April 2021	Kakanwil AHMAD ZAYADI
17	Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu	285 Tahun 2024	10 April 2024	Kakanwil HUSNUL MARAM
18	Desa Pabian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep	285 Tahun 2024	10 April 2024	Kakanwil HUSNUL MARAM
19	Desa Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo	384 Tahun 2025	20 Mei 2025	Kakanwil AKHMAD SRUJI BAHTIAR
20	Desa Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang	384 Tahun 2025	20 Mei 2025	Kakanwil AKHMAD SRUJI BAHTIAR

Sumber : Tim KUB Kanwil Kemenag Prov. Jatim

3. Mewujudkan Sasaran Program Ketiga. (SP-3) :Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
3	Menguatnya peran lembaga organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	1. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi	Lembaga	6,00	7,20	120,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	Kegiatan	3,20	5,00	156,25	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					138,13	
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	%	98,60	98,60	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,00	
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	%	43,16	42,02	97,35	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB), Penais Zawa, semua Bimas
		2. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	Lokasi	1,00	1,00	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,68	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) merupakan salah satu pilar yang menjaga harmoni di tingkat daerah. Persentase sekretariat bersama FKUB yang ditingkatkan layanannya mencapai 100%, menunjukkan konsistensi yang baik. Keberhasilan ini memperlihatkan bahwa FKUB dapat menjadi mitra strategis dalam membangun toleransi dan solidaritas sosial. Pada periode berikutnya, FKUB dapat lebih didorong untuk melahirkan inovasi berbasis komunitas, misalnya pelatihan mediasi konflik, program literasi toleransi di sekolah, atau riset sosial keagamaan yang melibatkan perguruan tinggi.

Adapun Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Yang Berperan Dalam Pembinaan Kerukunan di Jawa Timur dari berbagai unsur, diantaranya dari Unsur Kepala Kankemenag se Jawa Timur, Ketua FKUB se Jawa Timur dan Pimpinan Ormas Keagamaan se Jawa Timur.

Sementara itu Penerima Bantuan Operasional FKUB sebanyak FKUB 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Sedangkan Jumlah Dialog Lintas Agama Yang Diselenggarakan, sebagai berikut:

- Dialog di Kelurahan Karangbesuki Kota Malang tanggal 9 dan 10 Oktober 2025, dengan peserta lurah dan jajarannya, FKUB dan Tokoh Agama serta ASN Kemenag Kota Malang dan Kanwil.
- Dialog di Kelurahan Sidomukti Kraksaan Kab. Probolinggo tanggal 16 dan 17 Oktober 2025, dengan peserta lurah dan jajarannya, FKUB dan Tokoh Agama serta ASN Kemenag Kab. Probolinggo dan Kanwil.
- Dialog Kerukunan Lintas Agama, Peserta 200 orang terdiri dari ASN Kanwil dan Tokoh Agama, dilaksanakan 8 April 2025 di Aula Al Ikhlas Kanwil.
- Rapat Koordinasi dengan tokoh agama dan Bakesbangpol Jawa Timur, 30 dan 31 Oktober 2025 di Swiss Belinn Manyar.
- Pertemuan dengan Ketua FKUB Provinsi Jawa Timur, Pengurus FKUB dan beberapa FKUB Kabupaten Kota.

4. Mewujudkan Sasaran Progam Keempat. (SP-4) :Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	%	96,03	95,61	99,56	Penais Zawa, semua Bimas
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					99,56	
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	1. Persentase rumah ibadah yang ramah	%	53,96	52,84	97,93	Urais, semua Bimas
		2. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	%	20,37	19,93	97,86	
		3. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Orang	323,60	320,20	98,95	
		4. Jumlah rumah ibadah yang ditingkatkan menjadi percontohan	Lokasi	0,40	0,40	100,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					98,69	
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Kegiatan	4,60	4,60	100,00	Penais Zawa, semua Bimas
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					100,00	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Penyiaran agama berwawasan moderat juga stabil. kegiatan per tahun tercapai penuh 99,56%. Saat pandemi, siaran agama dialihkan ke platform digital, dan justru memperluas jangkauan audiens. Dari pengalaman tersebut, terlihat peluang besar untuk memperkaya konten penyiaran dengan format kreatif, seperti talkshow, film pendek, atau konten interaktif yang sesuai gaya komunikasi generasi digital.

Rumah ibadah sebagai pusat kehidupan keagamaan juga menunjukkan capaian tinggi. Indikator rumah ibadah ramah mencapai

Data Jumlah Tempat Ibadah Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Tempat Ibadah Agama Islam								
		Data Jumlah Masjid Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur berdasar Tipologi								
		Negara	Raya	Agung	Besar	Jami	Bersejarah	Di Tempat Publik	Nasional	Total Masjid
1	Kab. Pacitan	0	0	1	16	2462	15	293	0	2787
2	Kab. Ponorogo	0	0	1	20	1751	42	700	0	2514
3	Kab. Trenggalek	0	0	1	14	1345	1	375	0	1736
4	Kab. Tulungagung	0	0	1	19	1512	10	78	0	1620
5	Kab. Blitar	0	0	1	32	1218	7	114	0	1372
6	Kab. Kediri	0	0	1	30	2356	6	58	0	2451
7	Kab. Malang	0	0	1	46	1092	2	2145	0	3286
8	Kab. Lumajang	0	0	2	44	1342	1	62	0	1451
9	Kab. Jember	0	0	1	6	3744	0	15	0	3766
10	Kab. Banyuwangi	0	0	1	27	1749	16	214	0	2007
11	Kab. Bondowoso	0	0	1	11	1029	0	22	0	1063
12	Kab. Situbondo	0	0	1	21	432	1	546	0	1001
13	Kab. Probolinggo	0	0	1	25	1632	0	37	0	1695
14	Kab. Pasuruan	0	0	1	26	915	6	880	0	1828
15	Kab. Sidoarjo	0	0	1	11	1304	0	138	0	1454
16	Kab. Mojokerto	0	0	1	24	1091	0	120	0	1236
17	Kab. Jombang	0	0	1	8	1575	14	38	0	1636
18	Kab. Nganjuk	0	0	2	23	727	32	521	0	1305
19	Kab. Madiun	0	0	1	17	405	15	771	0	1209
20	Kab. Magetan	0	0	1	22	1149	18	263	0	1453
21	Kab. Ngawi	0	0	1	20	719	11	991	0	1742
22	Kab. Bojonegoro	0	0	1	27	1620	2	34	0	1684
23	Kab. Tuban	0	0	1	24	1009	4	10	0	1048
24	Kab. Lamongan	0	0	1	10	2382	2	85	0	2480
25	Kab. Gresik	0	0	2	8	1253	3	137	0	1403
26	Kab. Bangkalan	0	0	2	25	146	13	1077	0	1263
27	Kab. Sampang	0	0	1	4	1338	2	70	0	1415
28	Kab. Pamekasan	0	0	1	11	1459	0	9	0	1480
29	Kab. Sumenep	0	0	1	5	439	7	1646	0	2098
30	Kota Kediri	0	0	1	2	9	1	264	0	277
31	Kota Blitar	0	0	1	3	134	0	27	0	165
32	Kota Malang	0	0	2	5	664	0	53	0	724
33	Kota Probolinggo	0	0	1	3	224	1	16	0	245
34	Kota Pasuruan	0	0	0	1	119	0	6	0	126
35	Kota Mojokerto	0	0	1	3	38	1	64	0	107
36	Kota Madiun	0	0	1	2	168	3	71	0	245
37	Kota Surabaya	0	1	1	52	1388	18	311	0	1771
38	Kota Batu	0	0	1	3	52	4	162	0	222
Total		0	1	42	650	41991	258	12423	0	55365

Sumber Data : Bidang Uraiss Kanwil Kemenag Prov. Jatim

Meskipun pandemi sempat membatasi aktivitas berjamaah, setelah situasi kembali normal rumah ibadah justru semakin memperkuat fungsinya. Ke depan, rumah ibadah bisa dikembangkan sebagai pusat literasi agama, pemberdayaan sosial, bahkan pusat kegiatan ekonomi umat melalui koperasi berbasis jamaah.

97,9%, pembinaan pengelola rumah ibadah 97,8%, peningkatan kapasitas imam besar 98,9%, dan rumah ibadah moderat mencapai 100%. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat ritual, tetapi juga menjadi ruang sosial yang aman dan nyaman.

Data Jumlah Tempat Ibadah Per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Tempat Ibadah Agama Kristen	Jumlah Tempat Ibadah Agama Katolik				Jumlah Tempat Ibadah Agama Hindu	Jumlah Tempat Ibadah Agama Buddha					Jumlah Tempat Ibadah Agama Khong hucu
			JUMLAH TEMPAT IBADAH					JUMLAH TEMPAT IBADAH berdasarkan					
			PAROKI	STASI	KAPEL	Total Gereja		VIHARA	TITD	CETIYA	SANGGAR SUCI	Total	
1	Kab. Pacitan	96		2		2		0	0	0	0	0	
2	Kab. Ponorogo	55	2	10		12		2	0	0	0	2	
3	Kab. Trenggalek	23				0		0	0	0	0	0	
4	Kab. Tulungagung	86	1			1	4	3	1	0	0	4	1
5	Kab. Blitar	207	3	58		61	104	20	0	3	0	23	
6	Kab. Kediri	293	1	28		29	50					0	
7	Kab. Malang	413	8	35	9	52	57	13	0	1	1	15	
8	Kab. Lumajang	77	1	8		9	34	1	0	0	0	1	
9	Kab. Jember	101	3	11		14	12	4	1	0	0	5	
10	Kab. Banyuwangi	242	4	17		21	137	23	2	0	0	25	1
11	Kab. Bondowoso	55	1	1		2	2	1	0	0	0	1	
12	Kab. Situbondo	33	1	3		4		0	0	0	0	0	
13	Kab. Probolinggo	100	1			1	40	0	0	0	0	0	
14	Kab. Pasuruan	62	1	3	2	6	33	0	0	0	0	0	
15	Kab. Sidoarjo	158	3	2		5	4	4	0	0	0	4	1
16	Kab. Mojokerto	45		2		2	7	1	0	0	0	1	
17	Kab. Jombang	143	1	2		3	8	2	1	0	0	3	3
18	Kab. Nganjuk	92	1	8		9	1	1	0	0	0	1	1
19	Kab. Madiun	80		3		3	2					0	
20	Kab. Magetan	94	1	2		3	1	6	0	0	0	6	
21	Kab. Ngawi	106	1	22		23		1	0	0	0	1	
22	Kab. Bojonegoro	48	1	5		6		1	0	0	0	1	1
23	Kab. Tuban	57	1	3		4		0	1	0	0	1	1
24	Kab. Lamongan	69		1		1	1	0	0	0	0	0	
25	Kab. Gresik	109	1			1	8	0	0	0	0	0	
26	Kab. Bangkalan	24	1	1		2		0	0	0	0	0	
27	Kab. Sampang	10		1		1		0	0	0	0	0	
28	Kab. Pamekasan	22	1			1		1	0	0	0	1	
29	Kab. Sumenep	7	1			1		0	1	0	0	1	2
30	Kota Kediri	93	2			2	1	2	0	0	0	2	1
31	Kota Blitar	30	1			1		2	0	0	0	2	1
32	Kota Malang	117	7	1	5	13	5	7	0	1	0	8	1
33	Kota Probolinggo	53	1			1		0	1	0	0	1	1
34	Kota Pasuruan	47	1			1		1	0	1	0	2	1
35	Kota Mojokerto	52	1			1		4	1	0	0	5	1
36	Kota Madiun	60	2	0		2		3	1	1	0	5	1
37	Kota Surabaya	876	17			17	10	39	1	4	0	44	3
38	Kota Batu	33	1	1		2	5	5	0	1	0	6	
Total		4.268	73	230	16	319	526	147	11	12	1	171	21

Sumber Data : Pembimas Kristen, Katolik, Hindu, Budda

5. Mewujudkan Sasaran Progam Kelima. (SP-5) :Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	78,00	76,59	98,19	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	90,50	87,76	96,97	
		3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	%	56,50	55,76	98,69	
		4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	14,50	14,34	98,88	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB	
		5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	66,25	64,80	97,81		
		6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	58,66	57,91	98,71		
		7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	%	20,00	19,53	97,64		
		8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	%	47,50	46,20	97,26		
		9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	%	41,20	40,49	98,28		
		10. Jumlah kegiatan eks trakurikuler keagama an di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	217,60	211,20	97,06		
		11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Kegiatan	1,00	1,00	100,00		
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						98,14	
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	%	94,00	93,97	99,97	Bidang Pontren	
		2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	%	4,00	3,94	98,60		
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						99,29	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pendidikan diniyah dan inklusif menjadi indikator lain yang berjalan baik. Pendidikan diniyah berada di atas 90%, memperlihatkan keberlanjutan pendidikan berbasis tradisi pesantren dan komunitas. Pendidikan inklusif juga menunjukkan perkembangan dengan memberikan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan agama semakin inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan.

**DATA LEMBAGA PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL (PDF)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	KOTA/KABUPATEN	TOTAL LEMBAGA				SANTRI			USTADZ			RUANG KELAS
		PDF ULA	PDF WUSTHA	PDF ULYA	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	
1	MALANG	0	2	4	6	5	5	10	30	7	37	12
2	BANYUWANGI	0	1	0	1	0	0	0	4	7	11	20
3	SITUBONDO	0	0	1	1	5	4	9	3	2	5	9
4	PROBOLINGGO	0	2	3	5	0	2	2	60	21	81	31
5	MOJOKERTO	0	1	1	2	0	0	0	7	8	15	6
6	JOMBANG	0	3	3	6	25	65	90	40	12	52	47
7	MADIUN	0	0	1	1	13	20	33	9	7	16	9
8	MAGETAN	0	1	1	2	0	0	0	15	5	20	26
9	BOJONEGORO	0	0	1	1	0	0	0	6	1	7	6
10	TUBAN	0	3	3	6	1	0	1	69	1	70	37
11	BANGKALAN	0	2	3	5	0	0	0	55	36	91	106
12	PAMEKASAN	0	1	1	2	0	1	1	16	1	17	19
13	SUMENEP	0	1	3	4	33	23	56	46	11	57	27
14	KOTA KEDIRI	0	0	1	1	3	8	11	2	0	2	9
15	KOTA SURABAYA	0	1	1	2	0	0	0	119	44	163	295
SUMMARY TOTAL		0	18	27	45	85	128	213	481	163	644	659

NO	KOTA/KABUPATEN	KITAB KUNING	KITAB KUNING & PENDIDIKAN FORMAL	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	PACITAN	12	34	46	2093	1916	4009	238	144	382
2	PONOROGO	42	89	131	7770	7476	15246	908	524	1432
3	TRENGGALEK	55	25	80	2234	1766	4000	292	128	420
4	TULUNGAGUNG	49	27	76	2029	1977	4006	474	154	628
5	BLITAR	165	10	175	1871	2481	4352	402	223	625
6	KEDIRI	71	252	323	5777	3765	9542	637	348	985
7	MALANG	259	53	312	7805	8800	16605	1389	976	2365
8	LUMAJANG	87	117	204	4753	5761	10514	648	440	1088
9	JEMBER	173	600	773	10301	11471	21772	1113	524	1637
10	BANYUWANGI	129	114	243	7675	7659	15334	1119	564	1683
11	BONDOWOSO	55	129	184	3876	3701	7577	432	254	686
12	SITUBONDO	35	180	215	4482	2940	7422	318	196	514
13	PROBOLINGGO	239	69	308	6622	7338	13960	751	471	1222
14	PASURUAN	107	163	270	8335	8331	16666	672	507	1179
15	SIDOARJO	108	84	192	3503	4159	7662	684	424	1108
16	MOJOKERTO	85	114	199	4753	6104	10857	569	308	877
17	JOMBANG	151	84	235	9318	9850	19168	797	521	1318
18	NGANJUK	90	60	150	3623	5584	9207	518	276	794
19	MADIUN	71	31	102	1268	1023	2291	276	142	418
20	MAGETAN	38	30	68	2101	1968	4069	1017	202	1219
21	NGAWI	39	140	179	2175	3376	5551	460	300	760
22	BOJONEGORO	121	246	367	5802	5500	11302	998	520	1518
23	TUBAN	109	51	160	4804	4779	9583	504	296	800
24	LAMONGAN	129	129	258	5160	5111	10271	1127	753	1880
25	GRESIK	122	87	209	5309	5054	10363	840	501	1341
26	BANGKALAN	98	126	224	5916	4979	10895	564	200	764
27	SAMPANG	126	301	427	8640	8259	16899	1152	467	1619
28	PAMEKASAN	218	208	426	12682	13221	25903	1447	517	1964
29	SUMENEP	186	208	394	10961	11230	22191	1010	548	1558
30	KOTA KEDIRI	30	27	57	6896	2309	9205	636	428	1064
31	KOTA BLITAR	8	11	19	583	707	1290	213	113	326
32	KOTA MALANG	44	40	84	1824	1881	3705	392	151	543
33	KOTA PROBOLINGGO	18	16	34	509	793	1302	114	101	215
34	KOTA PASURUAN	2	30	32	805	761	1566	93	48	141
35	KOTA MOJOKERTO	4	13	17	414	724	1138	66	47	113
36	KOTA MADIUN	3	7	10	281	390	671	61	32	93
37	KOTA SURABAYA	82	35	117	2586	2388	4974	288	166	454
38	KOTA BATU	21	26	47	547	745	1292	155	135	290
SUMMARY TOTAL		3381	3966	7347	176083	176277	352360	23374	12649	36023

6. Mewujudkan Sasaran Progam Keenam. (SP-6) :Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	Kegiatan	30,20	30,00	99,34	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						99,34	
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadapkesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	Unit	1,40	1,40	100,00	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						100,00	
13	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Kegiatan	3,40	3,40	100,00	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						100,00	
14	Meningkatnya kualitas literasi khasanah budaya bemaas agama	1. Jumlah direktori pustaka agama yang di inventarisasi, kodefikasi dan digitalisasi	Dokumen	6,00	5,80	96,67	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
		2. Jumlah pengelola perpustakaan rumah ibadah yang dibina	Orang	14,80	14,60	98,65	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						97,66	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Bidang kebudayaan mencatat capaian merata tinggi. Dialog lintas budaya mencapai 97,3%, pelestarian produk budaya 100%, penghormatan keragaman budaya 95,6%, dan literasi budaya 100%. Capaian ini memperlihatkan bahwa program kebudayaan berhasil menjaga keseimbangan antara nilai agama dan tradisi lokal. Ke depan, digitalisasi dokumentasi budaya menjadi langkah penting agar generasi muda dapat mengakses kekayaan tradisi dengan lebih mudah dan menarik.

7. Mewujudkan Sasaran Progam Ketujuh. (SP-7) :Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	1. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	Unit	572,80	559,40	97,66	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
		2. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	%	27,83	27,06	97,22	
		3. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Kegiatan	59,00	57,80	97,97	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		4. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Lokasi	29,00	28,20	97,24	
		5. Jumlah SDM Ahli Falakiyah yang dibina	Orang	20,80	20,20	97,12	
		6. Jumlah Lembaga Hisab Rukyat yang ditingkatkan mutunya	Lembaga	0,80	0,80	100,00	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					97,87
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	1. Jumlah KUA yang direvitalisasi/ditingkatkan mutunya	Lokasi	4,60	4,60	100,00	Bidang Urais, Penais Zawa
		2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Lokasi	13,20	13,00	98,48	
		3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Orang	12863,90	6139,80	47,73	
		4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Orang	5676,60	3818,20	67,26	
		5. Jumlah penghulu yang dibina	Orang	112,20	113,80	101,43	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					82,98
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/hitta sukhaya	Pasangan	2386,00	2332,20	97,75	Bidang Urais, Penais Zawa, semua Bimas
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					97,75

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Layanan keluarga melalui KUA juga mendapat perhatian besar. Revitalisasi KUA tercapai penuh 100%, sedangkan kursus pranikah dan bimbingan keluarga mencapai rata-rata 94%. Meskipun pandemi membatasi pertemuan tatap muka, layanan tetap berjalan dengan penyesuaian. Setelah kondisi kembali normal, KUA kembali optimal memberikan layanan langsung kepada masyarakat. Materi kursus pranikah ke depan bisa diperkaya dengan topik literasi keuangan, kesehatan mental, dan ketahanan keluarga modern.

Data revitalisasi pada KUA (Kantor Urusan Agama) dengan jumlah Lembaga Agama/KUA se-Provinsi Jawa Timur sebanyak : 665 KUA. Sampai pada tahun 2025 jumlah KUA yang sudah dilakukan revitalisasi sebanyak 152 Lembaga KUA.

Setelah dilakukan peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan, juga telah dilakukan pelayanan Nikah dan Rujuk dengan melakukan bimbingan dan pembinaan. Sampai dengan tahun 2025 telah dilakukan Pembinaan Perkawinan sebanyak 172.462 pembinaan pasangan pengantin se-Jawa Timur. Juga telah dilakukan BRUS (Bimbingan Remaja

Usia Sekolah) yakni program Kementerian Agama untuk membimbing remaja agar siap menikah, mencegah pernikahan dini, dan membangun keluarga berkualitas dengan materi seperti kesiapan mental, fisik, hukum pernikahan, bahaya pernikahan dini, serta pergaulan remaja yang sehat sesuai syariat Islam, menjadikan remaja berkarakter dan bertanggung jawab. Telah dilakukan sebanyak 60.608 bimbingan. Juga telah dilakukan pembimbingan kepada Keluarga sebanyak 28.024. Sedangkan data jumlah penghulu dengan jumlah KUA di provinsi Jawa Timur, bisa dilihat Rasio perbandingan tenaga penghulu dengan KUA, yakni dengan jumlah penghulu keseluruhan dibandingkan jumlah KUA adalah 1.573 : 665. Adapun jumlah peristiwa nikah di Jawa Timur dapat dijumpai data Nikah dan Rujuk sebagai berikut :

DATA JUMLAH PERISTIWA NIKAH (PERNIKAHAN)
PADA KAB - KOTA SE JAWA TIMUR
Periode : Tahun 2020 - 2024

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Kab. Pacitan	3.812	4.228	3.869	3.769	3.483
2	Kab. Ponorogo	5.802	6.500	6.189	6.245	5.698
3	Kab. Trenggalek	5.249	5.497	5.218	5.161	4.963
4	Kab. Tulungagung	7.696	8.012	8.015	7.974	7.690
5	Kab. Lumajang	8.831	7.998	8.905	8.210	7.920
6	Kab. Bondowoso	6.156	5.516	6.346	5.558	5.311
7	Kab. Situbondo	4.898	4.864	5.385	5.105	4.741
8	Kab. Probolinggo	8.164	8.728	9.308	8.715	7.997
9	Kab. Pasuruan	13.202	13.171	13.407	12.395	12.131
10	Kab. Sidoarjo	14.299	13.961	13.895	13.002	12.650
11	Kab. Mojokerto	8.951	9.035	8.908	8.414	8.140
12	Kab. Jombang	10.594	10.237	10.378	9.884	9.556
13	Kab. Nganjuk	8.605	8.488	8.366	8.105	7.594
14	Kab. Magetan	4.679	4.399	4.260	4.291	3.901
15	Kab. Ngawi	6.199	6.294	6.426	6.091	5.698
16	Kab. Bojonegoro	9.689	9.823	9.806	9.521	8.960
17	Kab. Tuban	9.379	9.086	9.255	8.762	8.173
18	Kab. Lamongan	10.114	10.134	10.333	9.438	9.140
19	Kab. Gresik	9.176	9.448	9.631	8.842	8.904
20	Kab. Bangkalan	9.013	8.765	9.718	8.149	7.687
21	Kab. Sampang	8.023	8.275	9.235	7.649	6.747
22	Kab. Pamekasan	7.077	7.154	8.170	6.106	5.629
23	Kab. Sumenep	8.687	8.099	8.187	7.357	7.438
24	Kota Kediri	1.934	1.907	1.871	1.791	1.845
25	Kota Malang	5.481	5.092	5.146	4.869	4.522

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
26	Kota Probolinggo	1.841	1.718	1.809	1.638	1.582
27	Kota Pasuruan	1.623	1.525	1.567	1.453	1.339
28	Kota Madiun	1.149	1.105	1.077	1.027	940
29	Kota Surabaya	16.853	16.766	16.721	15.393	14.292
30	Kab. Banyuwangi	14.091	13.942	14.357	13.738	13.077
31	Kab. Blitar	9.098	8.953	9.216	8.636	8.213
32	Kab. Jember	21.225	19.573	19.723	18.003	17.210
33	Kab. Kediri	11.912	11.725	12.408	11.626	10.928
34	Kab. Madiun	5.263	5.071	5.219	4.941	4.520
35	Kab. Malang	20.397	20.290	20.606	19.934	19.506
36	Kota Batu	1.521	1.515	1.473	1.482	1.524
37	Kota Blitar	1.069	1.013	1.035	1.026	963
38	Kota Mojokerto	932	854	876	791	804
	JUMLAH	302.684	298.761	306.314	285.091	271.416

Sampai pada tahun 2024 dan 2025 juga telah dilakukan 9.997 istbat se-Provinsi Jawa Timur. Istbat nikah merupakan proses pengesahan hukum di Pengadilan Agama untuk pernikahan yang sudah dilangsungkan secara agama (misalnya nikah siri) tetapi belum dicatat secara administratif oleh negara (belum punya akta nikah), sehingga memberikan kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anaknya untuk mendapatkan akta nikah, status keluarga, serta hak waris dan harta bersama yang jelas. Tujuannya adalah legalisasi pernikahan yang tidak memiliki bukti otentik, terutama bagi yang menikah sebelum berlakunya UU Perkawinan atau karena alasan lain yang sah. Peristiwa istbat ini berdampak yang sangat positive terhadap keluarga dan anggotanya. Adapun Data Istbat Pernikahan di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

DATA JUMLAH PERISTIWA ISBAT PERNIKAHAN
PADA KAB - KOTA SE JAWA TIMUR
Periode : Tahun 2024 – 2025

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	2	3	4
1	Kab. Pacitan	-	-
2	Kab. Ponorogo	18	42
3	Kab. Trenggalek	87	102
4	Kab. Tulungagung	18	42
5	Kab. Lumajang	26	49
6	Kab. Bondowoso	89	404
7	Kab. Situbondo	122	51
8	Kab. Probolinggo	76	118
9	Kab. Pasuruan	215	94

No	Kabupaten/Kota	2024	2025
1	2	3	4
10	Kab. Sidoarjo	22	57
11	Kab. Mojokerto	16	41
12	Kab. Jombang	5	8
13	Kab. Nganjuk	4	12
14	Kab. Magetan	5	39
15	Kab. Ngawi	5	11
16	Kab. Bojonegoro	13	20
17	Kab. Tuban	7	3
18	Kab. Lamongan	37	49
19	Kab. Gresik	65	44
20	Kab. Bangkalan	586	512
21	Kab. Sampang	682	389
22	Kab. Pamekasan	584	638
23	Kab. Sumenep	537	781
24	Kota Kediri	2	9
25	Kota Malang	27	45
26	Kota Probolinggo	14	48
27	Kota Pasuruan	2	4
28	Kota Madiun	19	21
29	Kota Surabaya	586	532
30	Kab. Banyuwangi	114	94
31	Kab. Blitar	16	34
32	Kab. Jember	528	694
33	Kab. Kediri	49	66
34	Kab. Madiun	7	15
35	Kab. Malang	193	115
36	Kota Batu	11	11
37	Kota Blitar	-	2
38	Kota Mojokerto	1	13
	JUMLAH	4.788	5.209

8. Mewujudkan Sasaran Progam Kedelapan. (SP-8) :Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	1. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	%	86,10	83,33	96,79	Bidang PHU
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					96,79	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
19	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1. Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	%	31,08	30,23	97,29	Bidang PHU
		2. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	%	0,40	0,31	76,67	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					86,98	
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jamaah haji di asrama haji	1. Persentase asrama haji yang memenuhi standar pelayanan		0,00	7,20	0,00	Bidang PHU
		2. Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	%	86,20	51,58	59,84	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					29,92	
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	1. Persentase petugas haji yang profesional	%	87,82	84,55	96,27	Bidang PHU
		2. Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	%	95,75	53,68	56,06	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					76,17	
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (<i>Continuity service</i>)	%	95,80	93,85	97,96	Bidang PHU
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					97,96	

Bidang haji sempat sangat terpengaruh pandemi pada 2020-2021 dengan pembatalan keberangkatan. Namun sejak 2022, layanan kembali berjalan normal dengan sejumlah perbaikan. Inovasi yang diterapkan adalah *One Stop Service* di Asrama Haji Surabaya pada 2023, yang memudahkan jemaah menyelesaikan seluruh administrasi di satu tempat. Selain itu, penggunaan jalur *fast track* di bandara memperlancar proses keberangkatan dan pemulangan jemaah. Pada 2024, meski kuota jemaah meningkat, sistem ini tetap mampu melayani dengan baik. Namun memasuki periode 2025–2029, urusan haji berangsur tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama, sehingga pada dokumen perencanaan baru tidak lagi menjadi fokus utama.

Rekap Daftar Tunggu Jemaah Per 6 November 2025

NO	KAB/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KAB. SIDOARJO	38.951	43.960	82.911
2	KOTA SURABAYA	35.616	40.309	75.925
3	KAB. J E M B E R	33.452	33.778	67.230
4	KAB. GRESIK	31.386	34.074	65.460
5	KAB. LAMONGAN	28.066	31.246	59.312
6	KAB. M A L A N G	26.331	29.949	56.280
7	KAB. BOJONEGORO	23.189	25.644	48.833
8	KAB. PASURUAN	22.641	22.358	44.999
9	KAB. T U B A N	19.375	21.821	41.196
10	KAB. BANYUWANGI	18.857	21.152	40.009
11	KAB. K E D I R I	18.584	21.418	40.002
12	KAB. SUMENEP	18.677	19.336	38.013
13	KAB. PAMEKASAN	18.332	19.637	37.969
14	KAB. JOMBANG	16.956	20.089	37.045
15	KAB. MOJOKERTO	15.304	17.159	32.463
16	KAB. TULUNGAGUNG	14.694	17.442	32.136
17	KOTA MALANG	14.820	16.946	31.766
18	KAB. PROBOLINGGO	14.465	14.194	28.659
19	KAB. LUMAJANG	13.326	14.795	28.121
20	KAB. B L I T A R	12.643	15.266	27.909
21	KAB. N G A N J U K	10.609	12.019	22.628
22	KAB. BANGKALAN	8.815	9.946	18.761
23	KAB. PONOROGO	8.592	9.892	18.484
24	KAB. BONDOWOSO	9.304	8.630	17.934
25	KAB. SITUBONDO	8.414	8.654	17.068
26	KAB. TRENGGALEK	7.741	8.823	16.564
27	KAB. MAGETAN	6.623	7.638	14.261
28	KAB. SAMPANG	6.664	7.092	13.756
29	KAB. M A D I U N	6.338	7.191	13.529
30	KAB. N G A W I	5.652	6.342	11.994
31	KOTA KEDIRI	4.447	5.231	9.678
32	KOTA PROBOLINGGO	3.651	3.953	7.604
33	KOTA PASURUAN	3.480	3.832	7.312
34	KAB. PACITAN	2.893	3.151	6.044
35	KOTA MADIUN	2.757	3.190	5.947
36	KOTA B A T U	2.574	3.002	5.576
37	KOTA BLITAR	2.436	2.866	5.302
38	KOTA MOJOKERTO	2.330	2.671	5.001
JUMLAH		538.985	594.696	1.133.681

Rekap Daftar Tunggu Jemaah Haji Khusus Per 6 November 2025

NO	KAB/KOTA	JUMLAH
1	KOTA SURABAYA	6.380
2	KAB. SIDOARJO	3.205
3	KOTA MALANG	1.941
4	KAB. GRESIK	1.562
5	KAB. M A L A N G	1.483
6	KAB. J E M B E R	781
7	KAB. PASURUAN	753
8	KAB. LAMONGAN	714
9	KAB. T U B A N	708
10	KAB. JOMBANG	675
11	KAB. BANYUWANGI	654
12	KAB. BOJONEGORO	558
13	KAB. K E D I R I	527
14	KAB. MOJOKERTO	518
15	KAB. SUMENEP	509
16	KAB. B L I T A R	490
17	KAB. PROBOLINGGO	478
18	KAB. TULUNGAGUNG	449
19	KAB. LUMAJANG	437
20	KAB. N G A N J U K	421
21	KAB. BANGKALAN	417
22	KAB. PAMEKASAN	340
23	KOTA KEDIRI	312
24	KAB. MAGETAN	292
25	KOTA MADIUN	268
26	KAB. PONOROGO	267
27	KOTA B A T U	252
28	KAB. N G A W I	234
29	KOTA PROBOLINGGO	216
30	KAB. M A D I U N	203
31	KAB. BONDOWOSO	202
32	KOTA PASURUAN	191
33	KOTA BLITAR	177
34	KOTA MOJOKERTO	177
35	KAB. TRENGGALEK	164
36	KAB. SITUBONDO	135
37	KAB. SAMPANG	115
38	KAB. PACITAN	115
JUMLAH		27.320

9. Mewujudkan Sasaran Progam Kesembilan. (SP-9) :Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	1. Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	%	4,00	3,94	98,53	Bidang Penais Zawa
		2. Persentase lembaga zakat yang dibina	%	57,93	56,75	97,97	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					98,25	
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	%	62,46	61,44	98,37	Bidang Penais Zawa
		2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	%	20,00	19,71	98,54	
		3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	%	13,33	13,25	99,36	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKS / Capaian SK- :					98,75	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah memenuhi syarat tertentu, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai syariat Islam, berfungsi menyucikan harta dan jiwa serta membantu sesama. Secara bahasa berarti bersih, suci, tumbuh, dan berkah, sedangkan secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan untuk disalurkan kepada delapan golongan yang berhak. Kinerja bidang zakat menunjukkan capaian rata-rata 84,9%. Pembinaan Unit Pengumpul Zakat berjalan baik, walaupun sertifikasi Lembaga Amil Zakat masih menghadirkan peluang peningkatan. Dengan memperkuat akuntabilitas dan transparansi, lembaga zakat dapat lebih dipercaya masyarakat sehingga potensi pengumpulan dana zakat bisa lebih besar. Bidang wakaf mencatat capaian lebih tinggi. Akta ikrar wakaf mencapai 98,2%, sementara sertifikasi tanah wakaf berada di kisaran 90,8%. Aset wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi wakaf produktif yang dapat dimanfaatkan bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun data Daftar Unit Pengumpul Zakat Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebagai berikut :

DAFTAR UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
BADAN AMIL ZAKAT (BAZNAS) PROVINSI JAWA TIMUR

NO	INSTANSI	OPD	BUMD	SWASTA	SEKOLAH	MASJID	SK
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1					
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1					
3	BADAN KORDINASI WILAYAH BOJONEGORO	1					
4	BADAN KORDINASI WILAYAH JEMBER	1					
5	BADAN KORDINASI WILAYAH MADIUN	1					
6	BADAN KORDINASI WILAYAH MALANG	1					
7	BADAN KORDINASI WILAYAH PAMEKASAN	1					
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1					
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1					
10	BRIDA	1					
11	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1					
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1					
13	BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI JATIM	1					
14	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1					
15	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1					
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1					
17	DINAS KEHUTANAN	1					
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1					
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1					
20	DINAS KESEHATAN	1					
21	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1					
22	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	1					
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1					
24	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	1					
25	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	1					
26	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1					
27	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	1					
28	DINAS PERHUBUNGAN	1					
29	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1					
30	DINAS PERKEBUNAN	1					
31	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1					
32	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1					
33	DINAS PERTANIAN UPT PB Horti kultura	1					
34	DINAS PERUMAHAN RAKYAT , KAWASAN , PEMUKIMAN & CK	1					
35	DINAS PETERNAKAN	1					
36	DINAS SOSIAL	1					
37	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1					
38	DP3AK	1					
39	INSPEKTORAT PROVINSI	1					
40	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1					
41	SEKRETARIAT DAERAH	1					
42	SEKRETARIAT DPRD JATIM	1					
43	LAB HERBAL MATERIA MEDICA	1					
44	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1					
45	RS HUSADA PRIMA	1					
46	RSUD JIWA MENUR SURABAYA	1					
47	RSUD DAHA HUSADA	1					
48	RS PARU JEMBER	1					
49	RSU HAJI SURABAYA	1					
50	RS MATA MASYARAKAT	1					
51	RS PARU MANGUHARJO MADIUN	1					
52	RSUD DUNGUS	1					
53	RSUD DR SOEDONO MADIUN	1					

NO	INSTANSI	OPD	BUMD	SWASTA	SEKOLAH	MASJID	SK
54	RSUD DR SAIFUL ANWAR	1					
55	RSUD SUMBER GLAGAH	1					
56	RSUD.DR.SOETOMO	1					
57	RSUD KARSA HUSADA	1					
58	RSUD MOHAMAD NOER PAMEKASAN	1					
59	Sekretariat Dinas Pendidikan	1					
60	Cabdin Sidoarjo - Surabaya	1					
61	Cabdin Wil-Madiun - Ngawi	1					
62	Cabdin Wil - Ponorogo - Magetan	1					
63	Cabdin Wil - Tulung Agung - Trenggalek	1					
64	Cabdin Wil - Bojonegoro - Tuban	1					
65	Cabdin Wil Jember - Lumajang	1					
66	Cabdin Kab & Kota Kediri	1					
67	Cabdin Kota Malang & Batu	1					
68	Cabdin Wil Bondowoso - Situbondo	1					
69	Cabdin Kab & Kota Mojokerto	1					
70	Cabdin Kab & Kota Pasuruan	1					
71	Cabdin Wil Blitar	1					
72	Cabdin Kota Nganjuk	1					
73	Cabdin Kab Banyuwangi	1					
74	Cabdin Kab Jombang	1					
75	Cabdin Kab & Kota Probolinggo	1					
76	Cabdin Kab.Lamongan	1					
77	Cabdin Kab Malang	1					
78	Cabdin Kab gresik	1					
79	Cabdin Kab Pacitan	1					
80	Cabdin Kab Bangkalan	1					
81	Cabdin Kab Pamekasan	1					
82	Cabdin Kab Sumunep	1					
83	Cabdin Kab Sampang	1					
84	BANK JATIM		1				
85	KEMENAG JATIM	1					
86	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN	1					
87	Pengadilan Tinggi Agama SURABAYA	1					
88	BMKG JUANDA	1					
89	Diklat BLK PUPR VI Prov. Jatim	1					
90	BBVF PUSVETMA	1					
91	KADIN JATIM			1			
92	BKKBN Perwakilan JATIM	1					
93	UPT Pelatihan Kesehatan Masyarakat Murnajati	1					
94	UINSA				1		
95	PUSPAS UNAIR				1		
96	IAIN kediri				1		
97	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM				1		
98	STESIA				1		
99	AKN Sang Fajar				1		
100	Universitas Jember				1		
101	Poltekkes Kemenkes Surabaya				1		
102	ASDP		1				
103	PG RAJAWALI 1		1				
104	PT AIR BERSIH		1				
105	PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 5		1				
106	PELINDO Persero III		1				
107	SHANGRILA			1			
108	Satuan Kapal Selam	1					
109	KPPBC TMP Juanda	1					
110	Batalyon Zeni Zidam 5 Brawijaya	1					
111	RAMAYANA			1			

NO	INSTANSI	OPD	BUMD	SWASTA	SEKOLAH	MASJID	SK
112	UNIVERSITAS BRAWIJAYA				1		
113	Puskud Jatim		1				
114	UIN Tulung agung				1		
115	Universitas Trunojojo Madura				1		
116	LLDIKT WII VII	1					
117	UIN (KHAS) JEMBER				1		
118	IAIN Ponorogo				1		
119	SMA MAHARDIKA				1		
120	AL AMIN PERSYADAH			1			
121	TK ISLAMIC				1		
122	RRI		1				
123	BALQIS TRAVEL				1		
124	PT. ABADI METAL UTAMA			1			
125	SMK RAJASA				1		
126	ASTRA MOTOR			1			
127	SMP JALAN JAWA				1		
128	ODITURAD	1					
129	SMK KARTINI				1		
130	SMK 2 KAWUNG				1		
131	MASJID AL-FAJAR					1	
132	UPZ Masjid Akbar Moed'har Arifin					1	
133	Masjid Nasional Al - Akbar					1	
134	Masjid Syuhada					1	
135	Masjid Raya Islamic Center					1	
136	Masjid Al Hikmah Kebonsari					1	
	JUMLAH	96	8	6	20	6	
		136					

Sumber : Bidang Penais Zawa Kanwil Kemenag Prov. Jatim

10. Mewujudkan Sasaran Progam Kespuluh. (SP-10) :Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	%	56,50	55,32	97,92	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keagamaan	Lembaga	1,00	1,00	100,00	
		3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Lembaga	1,20	1,20	100,00	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					99,31
26	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	49,28	48,10	97,60	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	36,14	35,70	98,79	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	%	49,28	48,38	98,17	
		4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan	Orang	3,00	3,00	100,00	
		5. Jumlah penyelenggaraan asesmen kompetensi siswa di madrasah/sekolah keagamaan	Kegiatan	0,20	0,20	100,00	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	%	4,62	4,50	97,49	
		7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	%	84,66	83,21	98,29	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,62
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	%	24,20	23,91	98,80	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e- pembelajaran	%	27,43	27,06	98,66	
		3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	24,20	23,96	99,01	
		4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	%	38,33	37,63	98,16	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,66

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

11. Mewujudkan Sasaran Progam Kesebelas. (SP-11) :Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	1. Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	64,73	63,43	98,00	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	65,80	64,15	97,50	
		3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	51,75	50,72	98,01	
		4. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	70,56	68,90	97,64	
		5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana	%	30,00	29,50	98,33	
		6. Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan di daerah 3T yang ditingkatkan mutunya	%	47,96	22,60	47,12	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
		7. Persentase Sekolah Minggu Buddha/Dhammaseka Non Formal yang memenuhi SPM sarana prasarana	%	27,20	26,71	98,21	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					90,69
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat.	1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	Jumlah	601159,20	608538,80	101,23	Bidang Madrasah, Pontren, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS.	Jumlah	11186,00	11188,40	100,02	
		3. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP	%	64,15	48,40	75,45	
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP		0,00	23,10	0,00	
		5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	%	10,40	10,19	97,94	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					74,93
30	Meningkatnya kualitas penanganan ATS	1. Persentase madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi	%	0,13	0,13	98,51	Bidang Madrasah, Pontren
		2. Persentase ATS yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di pesantren	%	39,40	40,28	102,24	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					100,38
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Taman Seminari/ Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatan mutunya melalui BOP	Orang	320751,60	315393,00	98,33	Bidang Madrasah, semua Bimas
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,33

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor terbesar dalam kinerja Kementerian Agama. Integrasi kurikulum moderasi beragama tercapai 90,7%. Pesantren berwawasan moderat mencatat capaian 95,2%. Madrasah berhasil meningkatkan akreditasi, mutu pembelajaran, dan distribusi guru. Penyaluran BOS dan BOP berjalan efektif dengan capaian di atas 95%, menjaga keberlangsungan pendidikan terutama di masa pandemi. Guru Pendidikan Agama Islam juga mendapat perhatian, dengan capaian pembinaan di atas 95%, sementara distribusi guru berada pada kisaran 90%. Masih ada peluang perbaikan dalam hal pemerataan distribusi guru ke wilayah terpencil.

Data tahun 2025 menunjukkan Jumlah pesantren yang menyelenggarakan penguatan MB = 3.125 pesantren. Sampai saat masih belum pernah melakukan pendataan terkait Data Pesantren yang memiliki

rumah moderasi beragama. Adapun Data jumlah siswa yang mengikuti assesmen nasional dengan rincian sebagai berikut : Ula : 532 santri, Wustha : 4.392 santri, Ulya IPS : 3.198 santri, Ulya IPA : 257 santri. Data jumlah pesantren ramah anak berjumlah 188 pesantren. Data jumlah bantuan pendidikan (PIP, BOS, Beasiswa), terdiri : Jumlah PIP : 40.500 santri terdiri dari PIP Ula : 8.837 santri, PIP Wustha : 20.040 santri, PIP Ulya : 11.623 santri. Jumlah BOS : 1.676 santri terdiri dari BOS Ula : 203 santri, BOS Wustha : 727 santri BOS Ulya : 746 santri. Data jumlah anak tidak sekolah yang berhasil mengikuti PKPPS terdiri dari : Ula : 532 santri, Wustha : 4.392 santri, Ulya : Ulya IPS : 3.198 santri, Ulya IPA : 257 santri.

12. Mewujudkan Sasaran Progam Keduabelas. (SP-12) :Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
32	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Persentase guru madrasah dan ustadz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	%	74,80	72,89	97,45	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas
		2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	23,07	22,53	97,69	
		3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	10,77	10,50	97,50	
		4. Persentase ustad pendidikan diniyah/muadalah yang mendapatkan penguatan KKG/MGMP dan AKG	%	19,00	18,65	98,18	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					97,71	
33	Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal	1. Persentase guru sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	77,06	75,87	98,46	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase tenaga kependidikan lainnya di sekolah keagamaan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	76,66	75,09	97,95	
		3. Persentase guru pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	20,00	19,62	98,12	
		4. Persentase tenaga kependidikan pendidikan agama yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	%	0,00	0,00	0,00	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK - :					73,63	

Hasil pendataan Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Data-data yang terkait sebagai berikut : 1). Data guru tersertifikasi sampai dengan tahun 2025 sebesar : 17.919 GPAl. 2). Data guru PAI yg belum mengikuti PPG = 5.553 GPAl. 3). Data rasio guru

Agama Islam dg jumlah siswa = 8.115.907 siswa : 31.867 GPAI = 254,68 / GPAI. Dan Data jumlah kegiatan pengauatn kompetensi guru yang diselenggarakan FKG KKG MGMP (minimal setahun 2 kali). Sedangkan Data Guru Tahunan yang sudah mengikuti PPG sebagai berikut :

**Data Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam
Yang Mengikuti PPG Di Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Timur**

2022	2023	2024	2025	JUMLAH
41	728	994	14.852	16.615

13. Mewujudkan Sasaran Progam Ketigabelas. (SP-13) :Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
34	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik.	1. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah, Guru Madrasah, Guru Sekolah Keagamaan yang mengikuti PPG	%	42,20	41,33	97,93	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	%	81,20	79,32	97,68	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				97,81	
35	Meningkatnya pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan	1. Persentase guru/tenaga pendidikan di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	%	100,00	59,45	59,45	Bidang Madrasah, PAIS
		2. Persentase guru pendidikan agama Islam di madrasah daerah 3 T yang mendapatkan tunjangan khusus	%	70,00	28,48	40,68	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				50,06	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

14. Mewujudkan Sasaran Progam Keempatbelas. (SP-14) :Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan,

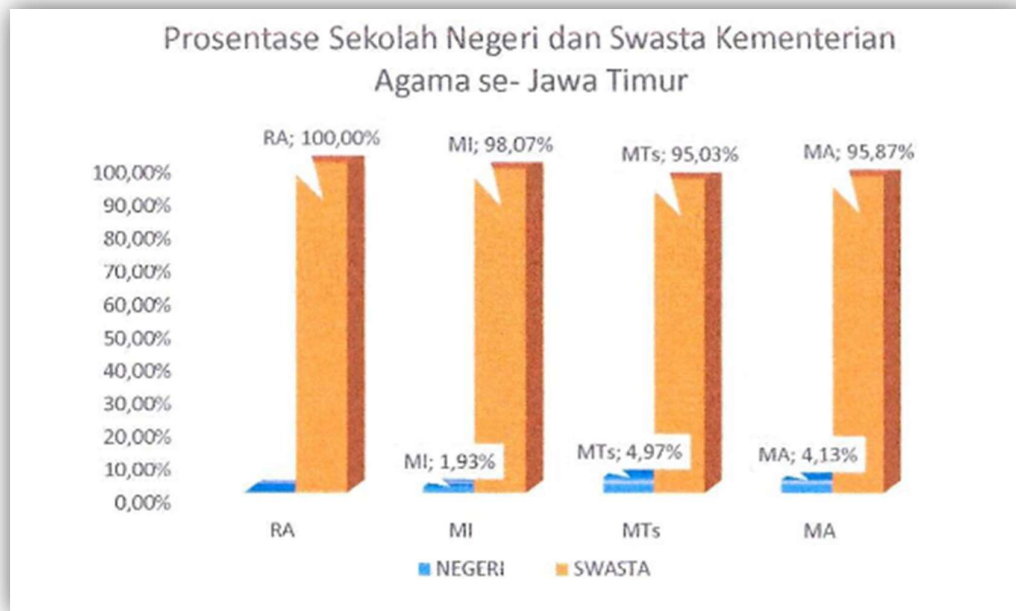
NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
36	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Lembaga	184,60	182,40	98,81	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi berdasarkan hasil pemetaan	Lembaga	45,40	44,60	98,24	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,52	
37	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	%	74,00	72,16	97,52	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	%	56,60	58,93	104,12	
		3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	4,62	4,52	97,75	
		4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	%	12,36	12,24	99,03	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					99,60	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

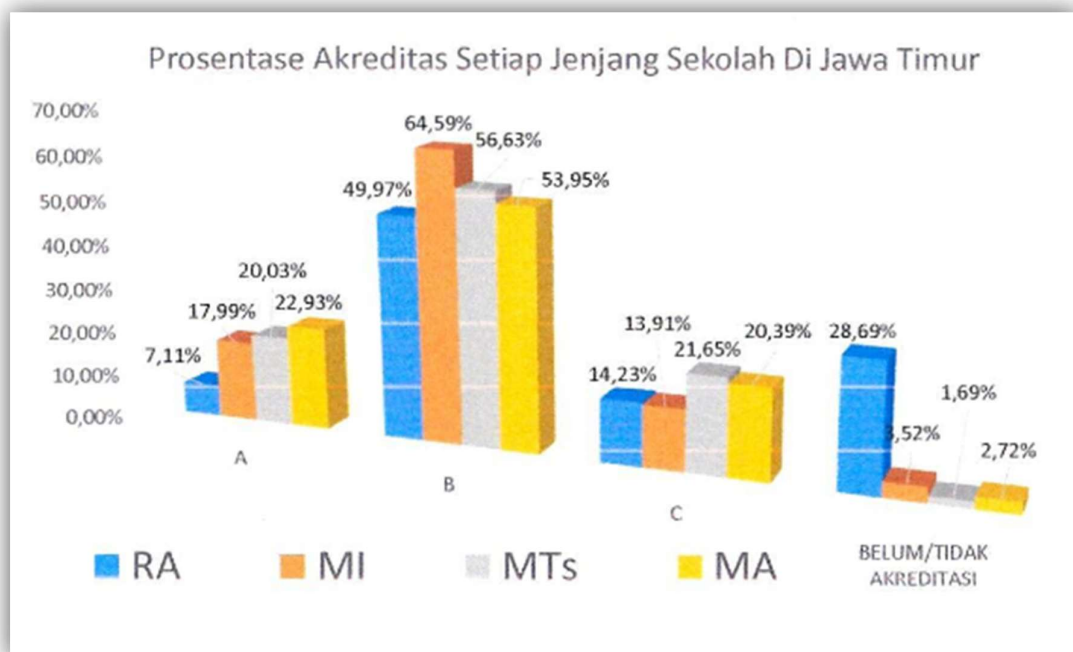
JUMLAH DATA LEMBAGA NEGERI/SWASTA, AKREDITASI, DAN SISWA JAWA TIMUR TAHUN 2025

NO	JENJANG	STATUS		JUMLAH	AKREDITASI				JUMLAH	SISWA		JUMLAH
		NEGERI	SWASTA		A	B	C	BELUM/TIDAK AKREDITASI		L	P	
1	RA	0	7.564	7.564	538	3.780	1.076	2.170	7.564	173.486	164.997	338.483
2	MI	148	7.530	7.678	1.381	4.959	1.068	270	7.678	537.047	477.744	1.014.791
3	MTs	200	3.828	4.028	807	2.281	872	68	4.028	301.518	298.450	599.968
4	MA	91	2.111	2.202	505	1.188	449	60	2.202	153.056	195.151	348.207
TOTAL				21.472	TOTAL				21.472	TOTAL		2.301.449

Sumber Data : Kanwil Kemenag Jatim Dalam Angka



Sumber Data : Kanwil Kemenag Jatim Dalam Angka



Sumber Data : Kanwil Kemenag Jatim Dalam Angka

DATA GTK MADRASAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025

DATA GURU

JENJANG		STATUS				SERTIFIKASI			
		ASN		NON ASN		ASN		NON ASN	
		L	P	L	P	L	P	L	P
RA	Negeri								
	Swasta	14	338	1.910	30.973	13	332	203	7.235
MI	Negeri	1.042	1.715	192	315	1.013	1.669	42	64
	Swasta	1.317	1.619	36.756	49.494	1.274	1.598	14.140	17.768
MTs	Negeri	2.282	3.112	670	994	2.169	2.923	1.681	201
	Swasta	329	279	26.368	23.726	281	264	9.032	66.661
MA	Negeri	1.415	1.739	595	757	1.316	110	1.602	154
	Swasta	147	95	15.563	13.082	118	82	4.813	2.996
GRAND TOTAL		6.546	8.897	82.054	119.341	6.184	6.978	1.711.033	94.878

Sumber Data : Kanwil Kemenag Jatim Dalam Angka

DATA TENDIK

JENJANG		STATUS			
		ASN		NON ASN	
		L	P	L	P
RA	Negeri				
	Swasta	1	2	297	2.278
MI	Negeri	38	62	270	120
	Swasta	0	1	2.280	2.299
MTs	Negeri	239	208	794	370
	Swasta	1	1	1.785	1.454
MA	Negeri	144	98	563	271
	Swasta	0	0	1.082	788
GRAND TOTAL		423	372	7.071	7.580

Sumber Data : Kanwil Kemenag Jatim Dalam Angka

15. Mewujudkan Sasaran Progam Kelimabelas. (SP-15) :Menguatnya pendidikan karakter siswa.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
38	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	80,00	78,60	98,25	Bidang Madrasah, Pontren, semua Bimas
		2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	%	67,25	65,99	98,13	
		3. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman;	%	56,00	55,18	98,54	
		4. Persentase madrasah yang ramah anak.	%	60,00	58,94	98,23	
		5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	%	68,00	66,46	97,74	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						98,18	
39	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Madrasah	23,00	22,20	96,52	Bidang Madrasah, PAIS, semua Bimas
		2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Sekolah	3,80	3,80	100,00	
		3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Unit	25,80	25,40	98,45	
		4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	Unit	4,80	4,80	100,00	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						98,74	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Jumlah kegiatan eskul, jumlah layanan pendidikan berbasis karakter, prestasi eskul,

16. Mewujudkan Sasaran Progam Keenambelas. (SP-16) :Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel.

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
40	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1. Persentase produk hukum yang diterbitkan	%	93,00	88,00	94,62	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)
		2. Persentase kasus hukum yang terselesaikan	%	80,00	90,40	113,00	
		3. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Kegiatan	0,80	1,60	200,00	
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						135,87	
41	Meningkatnya kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri	Persentase rekomendasi izin orang asing	%	96,20	84,11	87,43	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :						87,43	

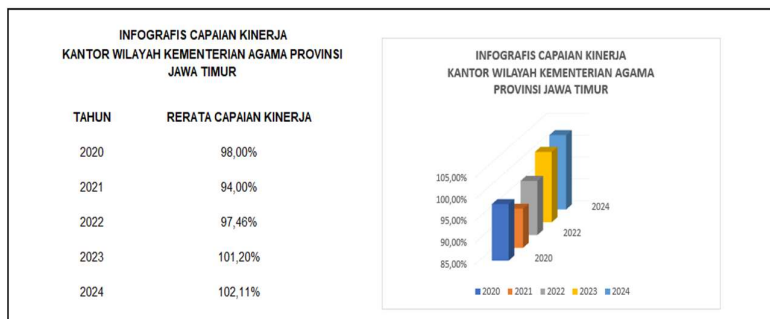
NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
42	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan,penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	%	100,00	100,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Kepegawaian dan Hukum)
		2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik,disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandakanlajuti	%	95,00	94,00	98,95	
		3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	%	70,00	66,64	95,20	
		4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	70,00	65,20	93,14	
		5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	%	70,00	63,47	90,67	
		6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	%	95,00	93,43	98,35	
		7. Persentase data ASN yang diupdate	%	90,00	89,00	98,89	
		8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	%	80,00	78,60	98,25	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					96,68	
43	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan.	1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu.	Dokumen	2,00	2,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	%	96,80	94,00	97,11	
		3. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	%	96,63	95,99	99,33	
		4. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	%	58,00	59,18	102,03	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					99,62	
44	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	55,92	54,98	98,32	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Persentase tanah yang bersertifikat	%	36,03	35,26	97,86	
		3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	%	98,00	97,04	99,02	
	Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :					98,40	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
45	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	%	80,00	79,18	98,98	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	%	60,00	59,24	98,73	
		3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	%	95,00	93,43	98,35	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				98,69	
46	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	%	90,00	88,46	98,29	Bagian Tata Usaha (Subbag Ortala KUB)
		2. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	Satker	17,00	17,00	100,00	
		3. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	Orang	17,20	16,20	94,19	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				97,49	
47	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	%	94,60	93,43	98,76	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
		2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	95,00	94,72	99,71	
		3. Persentase perencanaan kerjasama yang ditindaklanjuti	%	73,00	72,38	99,15	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				99,21	
48	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	%	94,80	94,40	99,58	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
		2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	%	74,00	73,60	99,46	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				99,52	
49	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	%	80,00	79,40	99,25	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				99,25	

NO	SASARAN KEGIATAN (SK)	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN (IKSK)	SATUAN	RATA-2 TARGET 2020-2024	RATA-2 REALISASI 2020-2024	RATA2 REALISASI (Dalam %)	PENANGGUNG JAWAB
50	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	%	99,42	99,40	99,98	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	%	88,44	87,67	99,13	
		3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	%	91,49	92,00	100,55	
		4. Persentase menurunnya lelang gagal	%	83,34	66,29	79,54	
		5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	%	78,08	61,12	78,28	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				91,50	
51	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	%	80,00	79,20	99,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				99,00	
52	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Kegiatan	40,20	71,00	176,62	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	%	93,80	93,20	99,36	
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				137,99	
53	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	%	80,00	79,00	98,75	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				98,75	
54	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Orang	24883,00	10065,80	40,45	Bagian Tata Usaha (Subbag Keuangan dan BMN)
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	100,00	Bagian Tata Usaha (Subbag Perencanaan, Data dan Informasi)
		3. Jumlah sarana dan prasarana perkantoran yan disediakan	Unit	16,00	15,80	98,75	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		4. Jumlah layanan umum dan perlengkapan	Unit	33,00	32,40	98,18	Bagian Tata Usaha (Subbag Umum dan Humas)
		Rata-Rata Prosentase Realisasi IKSK / Capaian SK- :				84,35	

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Tata kelola organisasi memperlihatkan capaian paling menonjol. Hampir semua indikator berada di atas 95%. Layanan humas dan informasi bahkan mencapai 143,6%. Komunikasi publik yang terbuka dan transparansi data



memperkuat akuntabilitas. Ke depan, pemerataan kualitas pelayanan antarwilayah tetap perlu diperhatikan agar seluruh masyarakat

merasakan manfaat yang sama.

Jika ditarik garis besar, capaian Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur selama 2020-2024 konsisten dan cenderung meningkat. Rerata capaian lima tahun berada di angka 98,55%. Beberapa indikator melampaui target, sementara yang lain masih memberikan ruang untuk peningkatan. Dengan capaian ini, arah ke depan dapat lebih fokus pada penguatan program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Memasuki periode 2025-2029, arah kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengacu pada delapan program prioritas yang dirumuskan dalam ASTA PROTAS. Fokus diarahkan pada penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan melalui desa sadar kerukunan, pembinaan penyuluh, dan forum lintas iman. Program ekoteologi menekankan pelestarian lingkungan berbasis nilai agama dengan rumah ibadah ramah lingkungan dan gerakan hijau berbasis komunitas. Layanan keagamaan diarahkan agar lebih berdampak dengan standarisasi bimbingan perkawinan, digitalisasi data rumah ibadah, serta KUA inklusif. Pendidikan unggul menjadi sektor kunci, dengan pengembangan kurikulum kontekstual, digitalisasi madrasah, peningkatan kesejahteraan guru, beasiswa, serta akreditasi. Pesantren diberdayakan melalui program kemandirian ekonomi, beasiswa santri, dan peran pesantren sebagai pusat layanan gizi. Ekonomi umat diperkuat dengan pengelolaan zakat dan wakaf

produktif serta rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan. Seluruh program tersebut ditopang digitalisasi tata kelola melalui sistem satu data, superapps layanan, dan pembelajaran berbasis LMS.

Dengan fondasi capaian 2020-2024 dan panduan ASTA PROTAS 2025-2029, arah kebijakan Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur dapat dilanjutkan secara lebih adaptif dan inklusif. Tantangan ke depan menuntut inovasi berkelanjutan, transparansi layanan, dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah. Program yang dirumuskan bukan hanya melanjutkan capaian sebelumnya, tetapi juga merespons kebutuhan baru masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik keagamaan di Jawa Timur diharapkan semakin kuat, merata, dan berdaya guna.

3. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

a. Data Jumlah Pegawai Se-Provinsi Jawa Timur

Tabel : 1

Data ASN berdasarkan PNS Dan PPPK Se-Provinsi Jawa Timur

NO	UNIT KERJA	JML PNS	JML PPPK	TOTAL ASN
1.	Satker Kanwil & Kab/Kota Se-Prov. Jawa Timur	23.047	12.450	35.497

Tabel : 2

Data PNS berdasarkan Jabatan Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

NO	JENIS JABATAN PNS	JUMLAH
1	Jabatan Pimpinan Tinggi	1
2	Pejabat Administrator	50
3	Pejabat Pengawas	254
4	Jabatan Pelaksana	2.631
5	Jabatan Fungsional	20.111
	Jumlah	23.047

Sumber : Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Jatim : Tim SDM Aparatur

Tabel : 3

Data PPPK berdasarkan Jabatan Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

NO	JABATAN PPPK	JUMLAH
1	Jabatan Fungsional	8.979
2	Jabatan Pelaksana	3.471
	Jumlah	12.450

Sumber : Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Jatim : Tim SDM Aparatur

- b. Data Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Luas Wilayah

Tabel : 4Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Luas Wilayah
Se-Prov. Jawa Timur

No	Kab/Kota	Kab	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (KM2)
1	Kab. Pacitan	1		12	5	1.389,92
2	Kab. Ponorogo	1		21	26	1.305,70
3	Kab. Trenggalek	1		14	5	1.147,22
4	Kab. Tulungagung	1		19	14	1.055,65
5	Kab. Blitar	1		22	28	1.336,48
6	Kab. Kediri	1		26	1	1.386,05
7	Kab. Malang	1		33	12	3.530,65
8	Kab. Lumajang	1		21	7	1.790,90
9	Kab. Jember	1		31	22	3.092,34
10	Kab. Banyuwangi	1		25	28	5.782,40
11	Kab. Bondowoso	1		23	10	1.525,97
12	Kab. Situbondo	1		17	4	1.669,87
13	Kab. Probolinggo	1		24	5	1.696,21
14	Kab. Pasuruan	1		24	24	1.474,02
15	Kab. Sidoarjo	1		18	31	634,38
16	Kab. Mojokerto	1		18	5	717,83
17	Kab. Jombang	1		21	4	1.115,09
18	Kab. Nganjuk	1		20	20	1.224,25
19	Kab. Madiun	1		15	8	1.037,58
20	Kab. Magetan	1		18	28	688,84
21	Kab. Ngawi	1		19	4	1.295,98
22	Kab. Bojonegoro	1		28	11	2.198,79
23	Kab. Tuban	1		20	17	1.834,15
24	Kab. Lamongan	1		27	12	1.782,05
25	Kab. Gresik	1		18	26	1.191,25
26	Kab. Bangkalan	1		18	8	1.001,44
27	Kab. Sampang	1		14	6	1.233,08
28	Kab. Pamekasan	1		13	11	792,24
29	Kab. Sumenep	1		27	4	1.998,54
30	Kota Kediri		1	3	46	63,40
31	Kota Blitar		1	3	21	32,57
32	Kota Malang		1	5	57	145,28
33	Kota Probolinggo		1	5	29	56,67
34	Kota Pasuruan		1	4	34	35,29

No	Kab/Kota	Kab	Kota	Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (KM2)
35	Kota Mojokerto		1	3	18	20,21
36	Kota Madiun		1	3	27	33,92
37	Kota Surabaya		1	31	154	350,54
38	Kota Batu		1	3	5	136,74
Jumlah		29	9	666	749	47.803,49

Sumber : Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Jatim : Tim Humas

c. Data Jumlah Satker Berdasarkan DIPA se-Provinsi Jawa Timur

No	Satker Berdasarkan DIPA	Jumlah
1	Kanwil Kemenag Prov. Jatim	8
2	Kantor Kemenag Kab/Kota Se-Prov.	186
3	MAN se-Prov. Jatim	91
4	MTsN se-Prov. Jatim	198
Jumlah		483

Sumber : Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Jatim : Tim Perencanaan dan Data

1.1.2.2 Layanan Publik : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID.

Sejak tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah menapaki langkah strategis membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah ini diwujudkan melalui perbaikan tata kelola dan pelayanan

publik, di antaranya dengan penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kini dilengkapi dengan standar layanan yang jelas, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi pelayanan ini menjadi bukti bahwa pembangunan ZI bukan sekadar slogan, tetapi upaya nyata untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Dalam perjalanannya, Kanwil Kemenag Jawa Timur terus melakukan inovasi untuk memastikan pelayanan publik semakin inklusif. Pelayanan ramah kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi perhatian serius. Penyediaan fasilitas fisik yang aksesibel, pendampingan petugas khusus, dan penggunaan media

informasi yang ramah difabel menjadi bagian dari standar pelayanan yang diterapkan di lingkungan Kanwil. Upaya ini menunjukkan bahwa semangat ZI juga berarti menjamin kesetaraan akses layanan bagi semua warga negara.

Penguatan integritas internal juga menjadi prioritas. Setiap pegawai dibekali pemahaman tentang kode etik dan perilaku, serta dilibatkan aktif dalam pengawasan internal. Mekanisme whistleblowing system dan pengaduan masyarakat ditata ulang agar lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat. Dengan demikian, setiap laporan, baik terkait dugaan pelanggaran maupun saran perbaikan layanan, dapat diproses secara transparan dan akuntabel.

Hasil dari upaya berkelanjutan ini mulai terlihat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP meningkat signifikan, tercermin dari hasil survei kepuasan yang dilakukan secara periodik. Waktu penyelesaian layanan menjadi lebih singkat, jumlah keluhan menurun, dan tingkat kepercayaan publik terhadap Kanwil Kemenag Jawa Timur semakin menguat. Fakta ini menjadi evidence bahwa penerapan prinsip integritas dan perbaikan layanan publik berjalan seiring, memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ke depan, Kanwil Kemenag Jawa Timur bertekad untuk mempertahankan dan memperluas capaian ini. Pembangunan ZI akan terus diarahkan pada perbaikan berkelanjutan, inovasi layanan publik, dan penguatan budaya kerja berintegritas. Dengan kolaborasi seluruh jajaran, semangat perubahan ini diharapkan semakin mengakar, sehingga visi mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan dipercaya publik dapat terwujud secara nyata dan berkesinambungan.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Yang diuraikan pada pembahasan Potensi dan Permasalahan yakni : Potensi yang Dimiliki, Permasalahan yang Dihadapi, selanjutna dilakukan Analisa

dengan menggunakan Analisis Lingkungan Strategis (SWOT), dengan Langkah - Langkah : Menyusun Matrik SWOT, memaparkan Implikasi Strategis, dan terakhir menampilkan Matriks Strategis Turunan SWOT (SO-ST-WO-WT).

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menunjukkan sejumlah potensi strategis yang dapat menjadi modal utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang agama dan pendidikan keagamaan. Potensi tersebut meliputi :

1. SDM Profesional dan Dedikatif Kanwil Kemenag Jatim didukung oleh sumber daya manusia yang relatif stabil dan berdedikasi, baik pada sektor pendidikan, penyuluhan, pelayanan keagamaan, maupun administrasi umum. Kehadiran para guru, penyuluh, penghulu, dan ASN lainnya menjadi fondasi penting dalam membangun layanan keagamaan dan pendidikan yang berkualitas.
2. Komitmen terhadap Moderasi Beragama Moderasi beragama telah menjadi prinsip kerja utama dalam berbagai program Kementerian Agama, dan secara nyata telah diimplementasikan lintas agama di Jawa Timur. Indeks Kerukunan Umat Beragama di beberapa wilayah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator positif harmonisasi kehidupan sosial-keagamaan.
3. Kemitraan Strategis Lintas Lembaga dan Tokoh Agama Kemenag Jatim memiliki jaringan kemitraan yang kuat dengan berbagai tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi motor penggerak dalam menciptakan layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Pemanfaatan Teknologi Digital Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi telah dimulai dengan pemanfaatan SPBE, EMIS, SIMKEU, dan platform layanan publik lainnya. Langkah ini

menjadi titik tolak transformasi digital layanan keagamaan dan pendidikan berbasis data.

5. Kualitas Pendidikan Keagamaan dan Madrasah yang Terus Meningkat
6. Lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren menunjukkan capaian yang progresif dalam hal akreditasi, pemenuhan SNP, dan penerapan kurikulum berbasis moderasi beragama. Ini memberikan optimisme terhadap daya saing lulusan di tingkat regional dan nasional.

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Meski demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan strategis yang harus diantisipasi dan ditangani dalam periode 2025–2029. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Kesenjangan Pemerataan Layanan Masih terjadi ketimpangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terutama dalam layanan pendidikan agama, bimbingan pernikahan, dan penyuluhan keagamaan seperti Bondowoso, Situbondo, Bangkalan, dan Sampang. Distribusi guru dan penyuluh agama belum merata dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
2. Transformasi Digital yang Belum Merata Meskipun infrastruktur TIK telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal di seluruh satuan kerja. Tingkat digitalisasi layanan, sistem informasi, dan pengarsipan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara utuh.
3. Isu Kerukunan dan Potensi Intoleransi Meskipun indeks kerukunan secara umum positif, dinamika politik identitas, intoleransi berbasis agama atau etnis, serta penyebaran informasi radikal di media sosial masih menjadi tantangan nyata yang perlu direspon secara sistematis, termasuk melalui peran strategis KUA sebagai pusat mitigasi konflik.
4. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Belum Merata Belum semua satuan kerja mencapai nilai optimal dalam indikator SPIP, Zona Integritas, dan manajemen risiko. Di sisi lain, penyusunan

perencanaan, pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan belum seluruhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan tepat waktu.

5. Keterbatasan Kompetensi ASN dan Rendahnya Sertifikasi Teknis
Tingkat profesionalisme ASN dan guru belum merata, terutama dalam hal kepemilikan sertifikasi kompetensi, kemampuan TIK, serta kesiapan dalam menghadapi transformasi kebijakan berbasis kinerja dan pelayanan digital.

1.2.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Untuk mengambil kebijakan, terutama dalam menentukan kinerja lima tahun kedepan, maka perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Selanjutnya dilakukan telaah dan analisis. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, dengan tabel sebagai berikut :

1.2.3.1. Matrik SWOT

Tabel 14 :
Tabel SWOT Analisis

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Ketersediaan SDM berdedikasi dan berpengalaman di bidang pendidikan, keagamaan, dan penyuluhan	Distribusi tenaga pendidik dan penyuluh belum merata, khususnya di wilayah 3T
Komitmen kelembagaan terhadap moderasi beragama, kerukunan, dan toleransi lintas iman	Masih terbatasnya jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensi dan digital readiness
Tersedianya sistem digital awal seperti EMIS, SIMKEU, dan SPBE untuk mendukung perencanaan dan monitoring	Transformasi digital belum terintegrasi lintas unit dan masih minim pemanfaatan big data
Kemitraan aktif dengan tokoh agama, ormas, dan lembaga keagamaan lokal serta pemerintah daerah	Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pengelolaan program terpadu
Peningkatan kualitas dan akreditasi satuan pendidikan keagamaan (madrasah/pesantren)	Beberapa satuan kerja belum memenuhi standar SPIP, laporan kinerja, dan reformasi birokrasi

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Dukungan strategis nasional terhadap transformasi digital layanan publik, RB tematik, dan SPBE	Meningkatnya intoleransi digital dan penyebaran paham radikal di media sosial
Potensi pendayagunaan dana zakat, wakaf, dan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat	Ketergantungan pada anggaran pusat dan fluktuasi kebijakan fiskal nasional
Animo masyarakat tinggi terhadap pendidikan madrasah, program keagamaan, dan sertifikasi pranikah	Polarisasi politik dan sentimen keagamaan menjelang tahun pemilu dan isu sosial

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Sinergi multipihak (tokoh agama, ormas, lembaga pendidikan) dalam penguatan layanan berbasis komunitas	Krisis kepercayaan publik jika pelayanan tidak transparan, lambat, atau tidak merata
Tren digitalisasi pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum moderasi beragama	Perubahan gaya hidup dan nilai generasi muda yang berpotensi menjauh dari nilai-nilai agama

1.2.3.1. Implikasi Strategis:

Adapun implikasi dari perumusan table SWOT diatas, dapat diambil beberapa Kesimpulan-kesimpulan kinerja yang perlu direkomendasikan untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Kekuatan internal perlu dikuatkan melalui penguatan SDM dan adopsi teknologi digital secara merata untuk mendukung integrasi layanan lintas bidang.
2. Kelemahan seperti ketimpangan layanan dan koordinasi antarsatker harus ditangani melalui sistem berbasis data dan reformasi birokrasi menyeluruh.
3. Peluang seperti sinergi multipihak, pemanfaatan dana zakat/wakaf, dan momentum digitalisasi pendidikan perlu dimanfaatkan untuk membangun sistem layanan inklusif dan responsif.
4. Ancaman eksternal seperti intoleransi, radikalisme digital, dan krisis kepercayaan perlu diredam melalui program mitigasi sosial seperti penguatan peran KUA, PPID, dan penyuluh berbasis media.

1.2.3.2. Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Tabel 15 :

Tabel Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Jenis Strategi	Rencana Aksi Strategis
SO (Strength- Opportunities)	1 Optimalisasi sistem digital SPBE dan EMIS untuk meningkatkan layanan berbasis data (dikaitkan dengan SDM unggul dan dukungan transformasi digital nasional).
	2 Kembangkan program kolaboratif lintas agama berbasis komunitas bersama tokoh agama dan ormas lokal.
	3 Dorong madrasah/pesantren unggul sebagai sentra pendidikan karakter dan moderasi beragama.
ST (Strength- Threats)	1 Perkuat peran KUA dan penyuluh dalam deteksi dini dan mitigasi konflik keagamaan berbasis EWS.
	2 Tingkatkan transparansi layanan publik dan pelaporan melalui PPID dan kanal digital terpercaya.

Jenis Strategi	Rencana Aksi Strategis
	3 Lakukan literasi digital keagamaan untuk menangkal narasi intoleran di media sosial.
WO (Weaknesses- Opportunities)	1 Percepat pemerataan distribusi guru/penduluh ke wilayah 3T melalui kebijakan afirmatif berbasis data kebutuhan.
	2 Bangun dashboard monitoring ASN dan pelatihan digital untuk akselerasi kompetensi teknis.
	3 Sinergikan pemanfaatan zakat dan wakaf dengan layanan pendidikan dan sosial di daerah minim akses.
WT (Weaknesses- Threats)	1 Bangun sistem pengawasan internal berbasis SPIP yang kuat untuk mencegah disfungsi layanan.
	2 Kembangkan pelatihan berkelanjutan dan mentoring ASN terkait pelayanan publik responsif dan moderatif.
	3 Integrasikan pelaporan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai early warning untuk krisis kepercayaan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi Dan Misi Kementerian Agama

Sebagai bagian dari kementerian yang memiliki mandat dalam urusan keagamaan, pendidikan keagamaan dan Tata Kelola Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjabarkan dan menyelaraskan visi nasional Kementerian Agama ke dalam arah pembangunan jangka menengah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Adapun Visi Kementerian Agama Tahun 2025–2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Yang Rukun, Maslahat, Dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Terdapat tiga kata kunci dalam visi Kemenag, yaitu Rukun, Maslahat, dan Cerdas. Kandungan makna dalam masing-masing kata tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama, **Rukun**.* Rukun merupakan dasar kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antar suku, dan antara masyarakat dan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai negara dengan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi,



yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, dan kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kerukunan juga mengisyaratkan cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi. Makna kesetaraan dalam kerukunan beragama merujuk pada pengakuan dan perlakuan yang adil terhadap setiap pemeluk agama tanpa membedakan latar belakang keyakinan. Kesetaraan ini menempatkan setiap individu dalam posisi yang sama di hadapan hukum, negara, dan masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan agamanya. Dalam konteks kerukunan, kesetaraan mendorong terciptanya ruang dialog yang sehat, saling menghargai perbedaan, serta kerja sama yang harmonis antarumat beragama demi menciptakan kehidupan sosial yang damai, toleran, dan inklusif. Kerukunan juga mengandung kerja sama sebagai kesediaan untuk melakukan aktivitas bersama dalam lingkup sosial atau ekonomi, dalam ikatan komunitas, pemukiman ataupun lingkaran profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagaman yang mengedepankan kerukunan adalah kunci dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap pembangunan.

*Kedua, **maslahat**.* Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagaman yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, serta memberi manfaat bagi kebaikan sosial lingkungan alam semesta. Beragama yang maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagaman yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.

Ketiga, Cerdas. Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Pencapaian visi cerdas dilakukan Kemenag melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Visi ini mencerminkan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis, pelayanan keagamaan yang berdampak, dan pendidikan keagamaan yang unggul sebagai pilar kemajuan bangsa. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur memaknai visi ini sebagai landasan dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pelayanan keagamaan yang inklusif dan adil, serta pengembangan pendidikan yang religius, berkualitas, dan berdaya saing global.

Misi Kementerian Agama :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan tiga misi utama yang akan menjadi arah pembangunan bidang keagamaan, pendidikan keagamaan dan tata kelola selama periode 2025–2029 :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

2.2. TUJUAN

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kementerian Agama menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi.
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau.
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing.
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

Program dan Sasaran Program.

- A. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, Indikator Kinerja Program sebagai berikut :
 1. Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun
 2. Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif
- B. Program Wajib Belajar 13 Tahun / Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, Indikator Kinerja Program sebagai berikut :
 1. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah Islam
- C. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Indikator Kinerja Program sebagai berikut :
 1. Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran
 2. Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata
 3. Meningkatnya kualitas kesesuaian pembelajaran bagi Anak Usia Dini

D. Program Dukungan Manajemen, Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel

Pencanangan Pelaksanaan Asta Protras Di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Untuk memastikan implementasi yang terarah dan terukur, Kementerian Agama menetapkan **Asta Protas** atau **Delapan Program Prioritas Kemenag Berdampak** yang menjadi pengungkit strategis pencapaian sasaran pembangunan keagamaan dan pendidikan keagamaan dan Tata Kelola yaitu :

1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan.

Untuk memperkuat kerukunan dan menumbuhkan cinta kemanusiaan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menterjemahkan rumusan strategi Kementerian Agama RI yang berorientasi pada kemaslahatan, penghormatan terhadap keberagaman, serta pembangunan budaya saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat, meliputi:

- a. Penyelenggaraan forum dialog tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pemuda lintas iman;
- b. Fasilitasi, pembinaan, dan penguatan kapasitas FKUB dalam menjalankan fungsi mediasi, fasilitasi pendirian rumah ibadah, dan penyelesaian perselisihan di Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur maupun Kabupaten/Kota;
- c. Sosialisasi moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama, guru pendidikan agama, Penyuluh Agama, tokoh agama, dan siswa di Lingkungan provinsi Jawa Timur;
- d. Menerapkan early warning system berbasis data dan laporan masyarakat untuk mendeteksi potensi konflik keagamaan dan penyelesaian konflik antar dan intra umat beragama;

- e. Menerapkan regulasi, pedoman, dan standar tata Kelola lembaga agama dan keagamaan dari Kementerian Agama RI yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keberpihakan pada kerukunan;
- f. Menerapkan penguatan KUA sebagai early warning system potensi konflik;
- g. Menerapkan penguatan kerukunan berbasis isu lingkungan, HAM, kesetaraan gender, budaya, dan digital;
- h. Melaksanakan kerja sama antarlembaga agama, Lembaga sosial keagamaan, dan pemerintah daerah dalam layanan keagamaan dan layanan Pendidikan di Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- i. Melaksanakan pembentukan agen kerukunan tingkat kabupaten/kota;
- j. Menerapkan kurikulum berbasis cinta kemanusiaan dan penghargaan terhadap perbedaan dalam program kediklatan dan pengembangan SDM yang dicanangkan Kementerian Agama RI;
- k. Melaksanakan intensifikasi kampanye nilai, kearifan lokal, dan budaya penopang di Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kota.;
- l. Melaksanakan program-program kerukunan umat di Lingkup Provinsi Jawa Timur; dan
- m. Melaksanakan penyebarluasan informasi positif melalui media cetak, elektronik, dan digital terkait toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama di Lingkup Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten / Kota.

2. Ekoteologi

Ekoteologi merupakan cara pandang iman yang melihat seluruh ciptaan sebagai suci dan saling terhubung dalam jaringan kehidupan. Di bidang agama mendorong lahirnya kebiasaan perilaku ekologis yang menumbuhkan kepedulian, rasa hormat, dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan, serta kelompok rentan. Penerapan penyelarasan

program prioritas ini dilaksanakan di lingkup provinsi Jawa Timur dengan menerapkan Langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengikutsertakan ASN Kementerian Agama, guru agama, penyuluh, mahasiswa, serta tokoh agama tentang nilai ekoteologi dalam ajaran agama saat program pelatihan dilaksakan oleh Kementerian Agama RI;
- b. Melaksanakan publikasi hasil penerbitan dan diseminasi bahan literasi keagamaan maslahat dari Kementerian Agama RI;
- c. Melaksanakan penyebaran pesan dakwah dan kampanye nilai maslahat melalui media massa, media sosial, dan komunitas;
- d. Berperan aktif dalam pelaksanaan survei dan kajian lapangan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI terkait pemahaman dan praktik keagamaan maslahat di kalangan Masyarakat lingkup provinsi Jawa Timur maupun kabupaten kota;
- e. Melaksanakan sosialisasi penyediaan fasilitas hijau (bank sampah, sumur resapan, panel surya, taman hijau, sanitasi sehat, transportasi ramah lingkungan) di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota, rumah ibadah dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan;
- f. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/kota, LSM lingkungan, dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan green pesantren, dan green madrasah/satuan pendidikan keagamaan;
- g. Menerapkan integrasi kurikulum pelestarian lingkungan dalam pendidikan agama dan keagamaan yang dirumuskan Kementerian Agama Pusat; dan
- h. Melaksanakan penyelenggaraan event keagamaan, event seni budaya bernapas agama dan perayaan keagamaan berbasis ekotiologi dan penghormatan atas keragaman budaya sebagai wujud pengamalan nilai agama di Tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

3. Layanan Keagamaan Berdampak

Layanan Keagamaan Berdampak dimaksudkan bahwa program dan kegiatan atau aktivitas yang dijalankan Kementerian Agama khususnya di Jawa Timur, berdasarkan nilai keagamaan dan diharapkan dapat berhasil memberikan nilai kontribusi positif yang nyata, konkret, dan bermanfaat luas bagi hidup masyarakat (baik material, spiritual, dan mental) serta menjaga kemaslahatan umum, terutama di Lingkup Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan program prioritas tersebut, dibutuhkan Langkah-langkah untuk mewujudkan sebagai berikut :

- a. Merealisasikan penyediaan sarana dan prasarana KUA (KUA berdaya), sesuai dengan target kegiatan yang ditetapkan akan dilaksanakan di Lingkup KUA di Provinsi Jawa Timur ;
- b. Melaksanakan penguatan kapasitas fasilitator bimbingan perkawinan, Penyuluh Agama, dan kurikulum bimbingan perkawinan yang kontekstual sesuai target yang ditetapkan di Provinsi Jawa Timur;
- c. Meningkatkan fasilitasi pernikahan sah, mudah, bermartabat, dan layanan inklusif di KUA di Lingkup Provinsi Jawa Timur.
- d. Melaksanakan pengarusutamaan program keluarga masalah, bimbingan remaja usia sekolah, dan edukasi berbasis nilai keagamaan sesuai target kegiatan di Provinsi Jawa Timur ;
- e. Melaksanakan bimbingan Penyuluh Agama terhadap kelompok sasaran sesuai target yang ditetapkan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
- f. Mensosialisasikan naskah-naskah dan buku keagamaan Islam yang layak edar/sesuai dengan kaidah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI;
- g. Mensosialisasikan modul, buku saku, media digital, dan konten dakwah berbasis kerukunan dan beragama maslahat yang disediakan oleh Kementerian Agama RI; dan
- h. Memberikan fasilitas kepada Penyuluh Agama dengan melakukan Kerjasama dengan Lembaga lintas sektoral (pemerintah daerah,

- kementerian/lembaga, lembaga pendidikan, Lembaga kesehatan, LSM, ormas, komunitas) dalam memberikan layanan bimbingan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Memberikan fasilitasi penentuan arah kiblat kepada Lembaga-lembaga yang membutuhkan layanan arah kiblat dan ikut mempublikasikan kalender hijriah yang ditetapkan Kementerian Agama RI;
 - j. Memanfaatkan dan mensosialisasikan aplikasi berbasis digital (misalnya jadwal salat, kalender hijriah, aplikasi halal, dan arah kiblat online) yang dapat diakses lembaga agama dan umat beragama;
 - k. Memberikan fasilitasi pemberian rekomendasi terkait pengiriman naskah dan buku keagamaan dari penulis atau penerbit untuk dilakukan proses penilaian dan pemberian tanda layak edar bagi naskah/buku yang memenuhi kriteria sesuai dengan regulasi oleh Kementerian Agama RI;
 - l. Memberikan fasilitasi pemberian rekomendasi untuk penerbit yang mengajukan mushaf Al-Qur'an, terjemah, serta produk turunan Al-Qur'an (terjemahan, tafsir, aplikasi digital) yang memperoleh tanda tashih;
 - m. Mendistribusikan hasil percetakan mushaf Al-Qur'an, Alkitab, Tripitaka, Weda, dan kitab suci lainnya dalam edisi resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI;
 - n. Melaksanakan sosialisasi hasil pengembangan aplikasi atau e-book kitab suci agar dapat diakses melalui perangkat digital oleh Kementerian Agama RI;
 - o. Berperan aktif dalam pelaksanaan survei ketersediaan kitab suci di rumah tangga, rumah ibadah, dan lembaga pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama RI; dan
 - p. Melaksanakan gerakan membaca kitab suci di sekolah, madrasah, widyalaya, satuan pendidikan keagamaan, pesantren, rumah ibadah, dan komunitas keagamaan di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi.

Untuk mewujudkan Pendidikan Unggul, Ramah dan terintegrasi dilaksanakan kegiatan dan aktivitas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di yang jauh dari pusat perkotaan, termasuk madrasah satu atap, inklusi, kelas filial, pembelajaran hybrid, jarak jauh, merdeka belajar dan berbasis teknologi;
- b. Melaksanakan program kegiatan peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, bantuan BOS/BOP, dan program afirmatif bagi keluarga prasejahtera, rentan, dan difabel;
- c. Melaksanakan penjangkaran anak tidak sekolah dan layanan pencegahan melalui pendidikan kesetaraan;
- d. Memberikan fasilitasi perpindahan peserta didik antarsatuan pendidikan formal dan non-formal;
- e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman dan peran keluarga serta tokoh agama, masyarakat, dan adat tentang pentingnya Pendidikan melalui media yang bisa dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung (online)
- f. Melaksanakan kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan prasekolah terutama untuk memberikan bekal kesiapan belajar pada jenjang wajib belajar;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan makan bergizi gratis pada Lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- h. Melaksanakan penguatan mutu lembaga pendidikan dasar menengah melalui pelaksanaan akreditasi unggul;
- i. Melaksanakan penyelenggaraan program pembelajaran bilingual pada satuan pendidikan;
- j. Memfasilitasi kegiatan peningkatan legalitas dan perlindungan hukum asset tanah wakaf untuk satuan pendidikan madrasah guna mendukung keberlangsungan dan kepastian layanan pendidikan;

- k. Menerapkan hasil pengembangan kurikulum integratif yang menggabungkan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan;
- l. Melaksanakan penguatan pendidikan agama, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan untuk memperkuat jati diri bangsa;
- m. Melaksanakan penguatan asesmen tingkat Provinsi berbasis Pendidikan agama yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk memantau perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik serta kualitas lingkungan belajar;
- n. Melaksanakan penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan perkembangan kebutuhan DUDIKA (Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Kerja) secara berkelanjutan;
- o. Menfalsifikasi pelaksanaa rekrutmen guru agama ASN secara terpusat sesuai dengan kebutuhan berbasis analisis beban kerja sesuai regulasi dan mekanisme yang berlaku;
- p. Melaksanakan penguatan peran Kemenag dalam memastikan penempatan guru agama sesuai dengan kebutuhan dan regulasi yang berlaku;
- q. Melaksanakan hasil pengembangan mekanisme jenjang karier guru berbasis sistem merit sesuai regulasi yang berlaku ;
- r. Melaksanakan hasil penjaminan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk finansial dan non-finansial sesuai regulasi yang berlaku ;
- s. Memfasilitasi pembentukan madrasah aliyah keagamaan dan kejuruan (vokasi);
- t. Menerapkan regulasi tentang restrukturisasi guru agama di lingkungan Kemenag;
- u. Menerapkan hasil pengembangan profesi kepala madrasah dan satuan pendidikan keagamaan;
- v. Melaksanakan hasil penguatan peran pengawas sebagai pendamping kepala satuan pendidikan;

- w. Mengikuti pelaksanaan kegiatan peningkatan pendidikan profesi guru untuk mendukung pemberian sertifikasi Guru dan Dosen; dan

5. Pesantren Berdaya

Pesantren Berdaya diwujudkan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan/aktivitas yang terkait akibat dari pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama RI;
- b. Melaksanakan penguatan pesantren dan ma'had aly sebagai sentra keunggulan kajian Islam di Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- c. Memfasilitasi santri yang mengikuti beasiswa santri dokter dan tenaga Kesehatan dalam bentuk rekomendasi sesuai regulasi yang berlaku;
- d. Mendukung pendirian pesantren bertaraf internasional;
- e. Menerapkan hasil penguatan regulasi dan standar mutu akademik, kurikulum, tata kelola, bahasa pengantar (Arab/Inggris), serta manajemen kelembagaan pesantren internasional;
- f. Mensosialisasikan hasil penyusunan dan penerapan kurikulum integrasi berbasis ilmu agama, sains, teknologi, dan kompetensi Bahasa asing;
- g. Mensosialisasikan regulasi proses akreditasi pesantren dengan standar mutu internasional dan penerbitan sertifikat kelulusan;
- h. Mendukung pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi bagi ustad/pengajar/dosen pesantren dan ma'had aly;
- i. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan asesmen internal dan eksternal untuk mengukur capaian mutu satuan pendidikan formal di pesantren sesuai dengan kewenangan di Tingkat Provinsi;
- j. Menfasilitasi pelaksanaan bantuan pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, serta sarana pembelajaran

berbasis IT, dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kewenangan di Tingkat Provinsi. (Pemberian Pengantar / Rekomendasi dll)

- k. Melaksanakan hasil penguatan regulasi terkait pengakuan ijazah, kesetaraan, serta kompetensi lulusan pesantren dan Pendidikan keagamaan di Tingkat Provinsi;
- l. Melaksanakan hasil penguatan kemandirian pesantren melalui santri entrepreneur, kewirausahaan, dan unit usaha produktif di Tingkat Provinsi sesuai dengan kewenangannya; dan
- m. Melaksanakan fasilitasi layanan rekognisi akademik dan professional lulusan pesantren dengan satuan pendidikan umum, PTN/PTS dalam dan luar negeri, serta dunia usaha/industry, sesuai dengan kewenangan di Tingkat Provinsi.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk melaksanakan program prioritas Pemberdayaan Ekonomi Umat, dibutuhkan Langkah-langkah untuk mewujudkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Sosialisasi optimalisasi dana sosial keagamaan (zakat, wakaf, infaq, shadaqah, punia, kebajikan, amal kasih) untuk penanggulangan kemiskinan dan pengembangan ekonomi umat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota;
- b. Melaksanakan pembentukan lembaga inkubasi wakaf produktif, pengembangan kota zakat/wakaf, dan rumah ibadah pusat ekonomi umat di Tingkat Provinsi;
- c. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga filantropi, kolaborasi pemanfaatan aset wakaf, dan penyusunan data terintegrasi berbasis wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Mensosialisasikan hasil pengembangan aplikasi dan kanal pembayaran zakat/dana sosial keagamaan secara online untuk mempermudah umat dalam menunaikan zakat/dana sosial keagamaan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi umat beragama dalam berzakat/berdharma;

- f. Melaksanakan kegiatan gerakan bersama pemanfaatan dana social keagamaan/filantropi keagamaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, stunting, dan peningkatan kesejahteraan umat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota;
- g. Ikut mendukung pelaksanaan penjaminan mutu lembaga dana sosial keagamaan/filantropi keagamaan di Tingkat Provinsi; dan
- h. Melaksanakan kegiatan penguatan kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

7. Pemberdayaan Rumah Ibadah

Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Mengusulkan dan merekomendasikan perbaikan bangunan, penyediaan fasilitas dasar (air bersih, listrik, sanitasi), dan peningkatan keamanan rumah ibadah sesuai kewenangan di Tingkat Provinsi;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan energi terbarukan (instalasi panel surya), penghijauan lingkungan rumah ibadah, pengelolaan sampah ramah lingkungan;
- c. Melaksanakan pelatihan manajemen dan tata kelola rumah ibadah inklusif sesuai target kinerja;
- d. Melaksanakan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga keagamaan, CSR perusahaan, dan organisasi sosial keagamaan untuk mendukung revitalisasi rumah ibadah;
- e. Melaksakan sosialisasi penyediaan fasilitas ramah anak, difabel, lanjut usia, perpustakaan dan layanan berbasis gender serta digital;
- f. Melaksanakan pelatihan manajemen dan tata kelola rumah ibadah inklusif;
- g. Melaksanakan pemilihan rumah ibadah percontohan di Tingkat Provinsi sesuai target kinerja di Tingkat Provinsi; dan

- h. Melaksanakan peningkatan kegiatan dan perayaan keagamaan di rumah ibadah dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak terkait.

8. Digitalisasi Tata Kelola

Langkah-langka yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Melakukan implementasi budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional melalui kode etik ASN, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), dan pengawasan internal yang akuntabel;
- b. Melaksanakan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi layanan digital dan digitalisasi dokumen layanan;
- c. Melaksanakan penerapan SPBE secara menyeluruh dalam proses administrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan terukur;
- d. Melaksanakan peningkatan kompetensi ASN Kemenag yang smart dan moderat;
- e. Melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi dan prosedur kerja melalui redesign proses bisnis yang lebih lincah, terfokus pada hasil (result-oriented), dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara real-time;
- f. Melaksanakan penguatan sistem evaluasi kinerja berbasis indikator yang jelas dan dapat diukur, serta mengaitkan hasil kinerja dengan pemberian reward dan sanksi secara proporsional;
- g. Melakukan pengembangan ekosistem data terbuka (open government) untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pengambilan keputusan publik;
- h. Mewujudkan satuan kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur;
- i. Mendukung pelaksanaan pengembangan satu data Kemenag dan satu akses layanan (Architecture Enterprise SPBE dan Integrasi

- Sistem Informasi) termasuk digitalisasi layanan dan pengawasan/pengendalian;
- j. Melaksanakan implemetasi manajemen talenta, sistim merit, dan reformasi birokrasi; dan
 - k. Meningkatkan dan mewujudkan pemanfaatan data terpadu dalam pengambilan kebijakan layanan bidang agama dan pendidikan agama/keagamaan.

2.3. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, serta mendukung pelaksanaan Asta Program Prioritas Kemenag Berdampak dan program utama, Kementerian Agama telah menetapkan Sasran Strategis dan Sasaran Program. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Sasaran Kegiatan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur merupakan turunan langsung dari sasaran kegiatan Kementerian Agama, yang secara hierarkis dijabarkan lebih lanjut pada level wilayah untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan nasional sektor agama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki keterikatan strategis dengan arah kebijakan nasional.

Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program utama Kementerian Agama dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pada dasarnya ada tiga bidang kategroring penggolongan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya, yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola. Kegiatan-kegiatan beserta sasaran kegiatan-sasaran kegiatan dan indikator-indikator sasaran kegiatan masing-masing Unit

Organisasi di Unit Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dengan rujukan/dasar dari SK dan IKS dari Eselon-1 :

1. Sekretariat Jendral : Bagian Tata Usaha
2. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Urusan Agama Islam
3. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Penerangan Agama Islam
4. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Madrasah
5. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Pondok Pesantren
6. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Agama Islam
7. Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen : Pembimbing Masyarakat Kristen
8. Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik : Pembimbing Masyarakat Katholik
9. Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu : Pembimbing Masyarakat Hindu
10. Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha : Pembimbing Masyarakat Buddha.

Adapun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

A. Sasaran Kegiatan Bidang Agama

Ada Sembilan Sasaran Kegiatan Bidang Agama, sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00
 - b. Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
 - c. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
 - d. Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA
 - e. Persentase peningkatan peserta event seni budaya
 - f. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

2. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
 - b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
 - c. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
 - d. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
 - e. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
 - f. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
 - g. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
 - h. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan
 - i. Persentase peningkatan buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
 - j. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
 - k. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
 - l. Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam
 - m. Persentase KUA Berdaya (Excelent)
 - n. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
 - o. Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
 - p. Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota

4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
 - b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
5. Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
6. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
 - b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
7. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A) , dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - 1) Lembaga penyelenggara haji khusus;
 - 2) Lembaga penyelenggara umrah
8. Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Ziswaf , dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
 - b. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan

- c. Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
 - d. Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
9. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Profesionalitas Lembaga Ziswaf, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
- a. Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional
 - b. Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional
 - c. Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina
 - d. Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf

Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan

B. Sasaran Kegiatan Bidang Pendidikan Dasar Menengah

- 1. Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik
- 2. Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - b. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana.

- c. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
 - d. Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)
 - e. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah.
 - f. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
3. Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
- a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: 1). literasi membaca 2). Numerasi
 - b. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas.
 - c. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran.
 - d. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler.
 - e. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab).
 - f. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan.
 - g. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B.
 - h. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara.
 - i. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual.

- j. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional.
 - k. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik.
 - l. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
4. Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
- a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik.
 - b. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP.
 - c. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal.
 - d. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik.
 - e. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil.
 - f. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil.
 - g. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik.
 - h. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil.
 - i. Persentase guru yang meningkat jenjang karir.
 - j. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir.
 - k. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
 - l. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

C. Sasaran Kegiatan Bidang Tata Kelola

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran
 - a. Nilai Kinerja Anggaran
2. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi
 - a. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
 - b. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
3. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 - b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - c. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
 - d. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). *(SE 6 Setjen tahun 2025, dari 492 yang ditunjuk 137, untuk kanwil 3 satker: setjen, bima, pendis)*
 - e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai), dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan.
 - c. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
5. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum
 - a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
 - b. Persentase rekomendasi izin orang asing
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :
 - a. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses.
 - b. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap

7. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
- b. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi

8. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Indeks Pembangunan Statistik
- b. Persentase data statistik yang dipublikasi

9. Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan, dengan Indikator Kinerja Kegiatan :

- a. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output.
- b. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
- c. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media.
- d. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
- e. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK.
- f. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra.
- g. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

2.4. MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

1. Pengertian :

Manajemen Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

2. Dasar Hukum

- a. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

- b. Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Peraturan BPKP tentang Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik
- d. KMA No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (kaitannya dengan tata kelola pendidikan)
- e. Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenag (mengacu pada PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020)

3. Tujuan Dan Prinsip Manajemen Risiko Di Kementerian Agama

- a. Tujuan
 - 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program keagamaan dan pendidikan
 - 2) Menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
 - 3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kemenag
 - 4) Mengurangi kemungkinan kegagalan program/kegiatan
 - 5) Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh pimpinan
- b. Prinsip
 - 1) Terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian program Kemenag
 - 2) Terstruktur dan menyeluruh di semua unit kerja
 - 3) Berdasarkan data dan informasi terbaik
 - 4) Disesuaikan dengan konteks tugas Kemenag (haji, pendidikan, layanan umat, bimas)
 - 5) Bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan regulasi & kebutuhan umat

MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

RENSTRA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025 – 2029

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
Bidang Agama				
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1 Munculnya pihak-pihak yang kurang / tidak menjamin adanya jaminan beragama terhadap event / peristiwa di Masyarakat. 2 Tidak adanya Toleransi beragama dan cinta cinta kemanusiaan umat beragama.	1. Mengidentifikasi dan mencegah adanya pihak-pihak yang tidak menjamin adanya jaminan beragama. 2. Melakukan aktivitas / kegiatan utk meningkatkan sikap toleransi beragama dan cinta cinta kemanusiaan umat beragama	• Bag. TU : Tim KUB, • Bidang Urais • Bidang Penais • Pembimas Kristen, • Pembimas Katholik, • Pembimas Hindhu, • Pembimas Buddha
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang Profesional, inklusif, dan berdampak	1 Adanya layanan keagamaan yang tidak Profesional, tidak inklusif (membedakan layanan karena status dll), dan tidak berdampak (tidak memberikan manfaat) 2 Sikap pelaku layanan keagamaan yang tidak kooperatif.	1 Melakukan identifikasi dan mitigasi pada layanan keagamaan yg tidak professional, inklusif dan berdampak dan pencegahan dan penyelesaiannya. 2 Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaku / petugas yang melakukan layanan keagamaan.	• Bag. TU : Tim KUB, • Bidang Urais • Bidang Penais • Pembimas Kristen, • Pembimas Katholik, • Pembimas Hindhu, • Pembimas Buddha
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan System haji	Adanya system pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system alayanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	• Kabid PHU dan Tim Bidang PHU.
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Adanya kendala-kendala dalam pendaftaran ibadah haji	Selalu berkoordinasi dan mengantisipasi adanya kendala kendala dan masalah-masalah pendaftaran baik sifatnya teknis dan	• Kabid PHU dan Tim Bidang PHU.

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
			non-teknis	
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan System haji	Adanya system pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system layanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	Kabid PHU dan Tim Bidang PHU.
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan System haji	Adanya masalah-masalah terkait kualitas system Haji	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system pembinaa haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	- Kabid PHU dan Tim Bidang PHU. - Kasi PHU dan Tim Seksi PHU Kab / Kota
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Adanya masalah-masalah terkait pengawasan dan penyelenggaraan Haji dan Umroh	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap Sistem Pengawasan Haji dan Umtroh yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	- Kabid PHU dan Tim Bidang PHU. - Kasi PHU dan Tim Seksi PHU Kab / Kota - Pihak Pengawas Internal Eksternal terkait
Bidang Pendidikan				
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Adanya kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala terkait akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	- Bidang Pendma - Bidang PD Pontren - Pembimas Kristen - Pembimas Katholik - Pembimas Hindhu - Pembimas Buddha
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	- Bidang Pendma - Bidang PD Pontren - Pembimas Kristen - Pembimas Katholik - Pembimas Hindhu - Pembimas Buddha

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Adanya laporan penyalahgunaan anggaran Pendidikan pada suatu Lembaga tertentu	Melakukan koordinasi dan mitigasi terhadap laporan yang ada dan menyelesaikan laporan tersebut sesuai regulasi yang berlaku	- Bidang Pendma - Bidang PD Pontren - Pembimas Kristen - Pembimas Katholik - Pembimas Hindhu - Pembimas Buddha
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	Adanya tenaga guru yang over di daerah tertentu dan adanya daerah yang kekurangan tenaga guru	Melakukan pembinaan dan koordinasi terkait distribusi guru agar merata pada satuan satuan Pendidikan di daerah yang ada.	- Bidang Pendma - Bidang PD Pontren - Pembimas Kristen - Pembimas Katholik - Pembimas Hindhu - Pembimas Buddha
Bidang Tata Kelola				
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	- Adanya pemahaman bahwa hasil perencanaan sama / stagnan dengan hasil perencanaan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. - Adanya pelaksana perencanaan dan anggaran yang kurang berkualitas	- Memberikan pemahaman bahwa hasil perencanaan berdasarkan konsep perencanaan dan target yang ditentukan sesuai kurun waktu yang ditentukan (misalkan dari Renstra lima Tahunan : berarti dalam lima tahun program dan kegiatan mirip mirip, karena sudah direncanakan selama lima tahun beserta target-targetnya) - Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaksana perencanaan dan anggaran agar bertambah berkualitas hasil perencanaannya	Bagian Tata Usaha : Tim Perencanaan dan Data

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Adanya laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), birokrasi yang lambat dan rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	Melakukan Solusi dan penyelesaian terkait Adanya laporan-laporan terkait Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), birokrasi yang lambat dan rumit, serta kurangnya komitmen terhadap perubahan paradigma layanan para pelaku birokrasi.	• Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Adanya masalah penatausahaan (inventarisasi dan pencatatan yang tidak akurat), masalah penggunaan (penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi), masalah hukum (sengketa kepemilikan tanah), dan masalah pemanfaatan (BMN tidak terpakai/idle)	Menyelesaikan sesuai regulasi yang berlaku dan terus melakukan pembinaan terhadap pelaksana BMN yang terkait.	• Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Proses yang belum sepenuhnya profesional: Seleksi ASN masih belum dapat sepenuhnya menjamin profesionalisme dan keahlian teknis yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan	Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi secara bertahap dan konsisten	• Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Kurangnya Sinergi dan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti instansi terkait, OBH, dan lembaga penegak hukum lainnya masih belum berjalan optimal.	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin sesuai kesepakatan bersama	• Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas • Instansi Terkait
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Adanya Dokumen surat yang penting rentan terhadap kebocoran informasi jika tidak ada mekanisme keamanan yang kuat.	Perlu penguatan system keamanan dan pemahaman Bersama antar pelaku tata persuratan.	• Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas • Ketua Tim dan Anggota
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Adanya keterbatasan dalam mengakses dokumen / arsip / data	Perlu disepakati Bersama cara cepat mengakses dokumen / data	• Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha

No	Sasaran	Risiko Indikasi	Perlakuan Risiko Indikasi	Pj Perlakuan Risiko Indikasi
		yang dibutuhkan sehingga bisa menghambat proses layanan.	sesuai kewenangan masing-masing.	• Kepala Bidang • Pembimas • Ketua Tim dan Anggota
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	• Adanya Data yang sama tersimpan di beberapa tempat dan tidak sinkron menyebabkan kebingungan, inefisiensi, dan peningkatan biaya operasional • Adanya ketidakjelasan dalam mengakses data yang diperlukan di stakeholder internal (Bag TU, Bidang, Pembimas)	Perlu adanya bank Data / Data base/server yang bisa diakses sewaktu waktu sesuai dengan kewenangan masing-masing	• Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas • Ketua Tim dan Anggota
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	Adanya masalah terkait Terbatasnya pengetahuan tentang konsep layanan prima dan kurangnya kompetensi dalam memberikan pelayanan menjadi kendala utama.	Perlu adanya pembinaan bertahap / berjenjang sesuai periode waktu yang ditentukan	• Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas • Ketua Tim dan Anggota

2.5. Rumusan Pengukuran / Metadata

Tabel Rumusan Pengukuran Kinerja ini menjelaskan pengukuran pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Rumusan Pengukuran :

1. Kode SK
2. IKSK
3. Kode IKSK
4. IKSK
5. Cara Pengukurannya
6. Penanggung jawab dari tiap IKSK
7. Sumber Data IKSK
8. Variabel Pembangun
9. Periode Pelaporan IKSK

Pada Tabel ini diuraikan 20 Sasaran Kegiatan dan 82 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Adapun secara garis besar , cara pengukuran meliputi :

1. Indeks
2. Persentase
3. Persentase Peningkatan
4. Rasio
5. Jumlah
6. Rata-Rata Nilai
7. Instrumen yang ditentukan sesuai regulasi

Metadata :

Metadata pada prinsipnya menjelaskan tentang IKSK yang dipilih, selanjutnya diuraikan tentang :

- Nama SK,
- Nama Metadata IKSK,
- Instansi – Unit Kerja Penghasil,
- Nama Indikator,
- Konsep/Definisi,
- Interpretasi,
- Metode / Rumus Perhitungan,

- Nama Variabel Pembangun,
- Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun,
- Ukuran/Satuan,
- Waktu / Cut off Ketersediaan Data,
- Klasifikasi,
- Level Estimasi,
- Apakah indikator dapat diakses umum?,
- Apabila dapat diakses umum,
- apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya).

Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIDANG AGAMA								
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	IKUB = (Nilai Dim.Toleransi + Nilai Dim.Kesetaraan + Nilai Dim.Kerjasama) / 3	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerjasama	Tahunan
		IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a: Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b: Jumlah total KUA secara nasional	Bid. Urais	Bid. Urais	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System	Tahunan
		IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya	Sekjen : KUB	Sekjen : KUB / FKUB, Kab/Kota	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b= Jumlah audiens MTQ/ Pesparani/ Pesparawi/ Utsawa	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Dharma Gita/ Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya				
		IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persentase Peningkatan = $\frac{(a-b)}{b} \times 100$ Keterangan : a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	Rumusan = $\frac{(a-b)}{b} \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
		IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persentase = $\frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: a = Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan b = Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/ pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar	Tahunan
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persentase = $\frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat)2. Jumlah total penyuluh agama	Tahunan
		IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	$X = \frac{b}{a}$, sehingga rasionya menjadi 1 : X Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Tahunan
		IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persentase = $\frac{a}{b} \times 100$ Keterangan : a = Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi b = Jumlah semua fasilitator bimbingan perkawinan agama	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi 2. Jumlah semua fasilitator bimbingan perkawinan agama	

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan : a = Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan b = Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS	Tahunan
		IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan b = jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan 2. Jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	
		IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan : a = Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan b = Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada.	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan 2. Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada	
		IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan : a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata	Bidang Urais	Bidang Urais dan Seksi Bimas Islam Kab/Kota	Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat. Jumlah total masjid/musholla	Tahunan
		IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan:	Khonghucu, Bimas Islam,	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid.	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sesuai kaidah	a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya	Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya	
		IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan	Bidang Urais	Bidang Urais dan Seksi Bimas Islam Kab/Kota	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan2. Jumlah total hasil pemantauan	Tahunan
		IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Tahunan
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b = Total kuota jemaah lansia yang tersedia pada tahun berjalan	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan	Tahunan
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b = Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana	Tahunan
		IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan:	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU	Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas2.	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Terpadu	a = Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b = Jumlah total responden survei		Kab/Kota	Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survei	
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b = Jumlah total unit layanan yang tersedia	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji	Tahunan
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya	Tahunan
		IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haj 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan	Tahunan
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan b = Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Persentase PIHK terakreditasi A2. Persentase PPIU terakreditasi A	Tahunan
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH								
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan agama, satuan kekhasan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren dengan predikat yang lulus sangat baik	Persentase = $(a / b) \times 100$ a = Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik b = Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus.	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1 Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik 2 Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							yang lalu.	
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Tahunan
		IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras b = Total jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras 2. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan	Tahunan
		IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	Bidang PD Pontren	Bidang PD Pontren dan Seksi PD Pontren Kab/Kota	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren	Tahunan
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	1. Literasi Membaca : Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi 2. Numerasi Rumus : Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Numerasi b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Literasi Membaca. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Numerasi. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang mengikuti AKM	Tahunan
		IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan	Persentase = $(a / b) \times 100$	Bid. Pendis,	Bidang	1. Jumlah satuan pendidikan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran	Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran	
		IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Rumus = Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Tahunan
		IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan	Tahunan
		IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum	Tahunan
		IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan : a = Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah Satuan Pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah Satuan Pendidikan minimal B 2. Total jumlah Satuan Pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan	Persentase = $(a / b) \times 100$	Bid. Pendis,	Bidang	1. Jumlah satuan pendidikan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			unggul yang terselenggara	Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan	Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	2. Total jumlah satuan pendidikan	
		IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah satuan pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa	Tahunan
		IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh kategori baik pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang dinilai	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai	Tahunan
		IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas :	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia. 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				yang tersedia		Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha		
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru	Tahunan
		IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	Jumlah guru madrasah Jumlah siswa madrasah	Tahunan
		IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya	Tahunan
		IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama	Tahunan
		IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Tahunan
		IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan	Persentase = (a / b) × 100	Bid. Pendis,	Bidang	1. Jumlah Kepala Madrasah	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	
		IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Tahunan
		IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil b = Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil 2. Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Tahunan
		IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru	Tahunan
		IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu,	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS,	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				jenjang karir dalam periode tertentu. $b = \text{Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama}$	Bimas Buddha	Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	pendidikan	
		IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: $a = \text{Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan}$ $b = \text{Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya}$	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: $a = \text{Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan}$ $b = \text{Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti}$	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun	Tahunan
BIDANG TATA KELOLA								
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome	Tahunan
SK.12	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.12.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021	Sekretariat/TU : Tim Ortala	Sekretariat/TU : Tim Ortala	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021	Tahunan
		IKSK.12.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Sekretariat/TU : Tim Ortala	Sekretariat/TU : Tim Ortala	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik	
SK.13	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.13.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Tahunan
		IKSK.13.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan	Sekretariat/TU : Tim Ortala dan TLHP	Sekretariat/TU : Tim Ortala dan TLHP dan Tim Keuangan & BMN, Tim Hukum POA	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)	Tahunan
		IKSK.13.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Rumus: Y = (X2/X1) X 100	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun Laporan Keuangan dan Jumlah satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Tahunan
		IKSK.13.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi	Tahunan
		IKSK.13.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN			yang diwajibkan menyusun RKBMN	
SK.14	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	IKSK.14.1	Indeks Profesionalisme ASN	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.	Tahunan
		IKSK.14.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	Tahunan
		IKSK.14.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.15.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum	Triwulan
		IKSK.15.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 3. Rekomendasi Izin Tinggal	Triwulan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				asing			Tetap (ITAP) 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian 8. Izin Studi 9. Izin Penelitian 10. Izin Studi	
SK.16	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK. 16.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)	Tahunan
		IKSK. 16.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran	Triwulan dan tahunan
SK.17	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.17.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Kebijakan dan Regulasi Struktur Organisasi dan SDM PPID 2. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 3. Layanan Informasi Publik 4. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 5. Monitoring dan Evaluasi	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPO RAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.17.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan. b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik	Tahunan
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	- Pengumpulan data (misalnya, wawancara atau survei) dan kemudian - mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari empat skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio.	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data 3. Proses Bisnis Statistik 4. Kelembagaan; dan 5. Sistem Statistik	Tahunan
		IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persentase = ((a - b) / b) x 100 Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi dan Tim Perencanaan & Data	1. Data Statistik 2. Media Informasi Publik	Tahunan
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan	Tahunan
		IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya	Sekretariat/TU	Sekretariat/TU (semua Tim)	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)	
		IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi	Tahunan
		IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal	Tahunan
		IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK	Tahunan
		IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan:	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			indikator RPJMN dan Renstra	a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra	& Data	& Data dan Sub Bag TU Kab/Kota	membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data	
		IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai dari Kementerian Keuangan	Bag. TU, Bidang & Pembimas Kristen, Katholik, Hindhu & Buddha	Bag. TU, Bidang & Pembimas Kristen, Katholik, Hindhu & Buddha	1. DIPA / RKA-KL 2. Rencana Aksi / Rencana Kegiatan 3. RPD (Rencana Penarikan Dana) 4. LPJ (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan & Anggaran.	Triwulan

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, saat ini menetapkan 20 Sasaran Kegiatan dan 82 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Tetapi mulai tahun 2026, karena Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah menjadi Kementerian sendiri maka Sasaran Kegiatan berjumlah : 15 Sasaran Kegiatan dan 75 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana akan diuraikan di Bab II ini.

Dalam penetapan target Kinerja ditetapkan beberapa kategori sebagai berikut :

1. Penentuan Target Indikator Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bersifat akumulasi target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai Dari Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan pondok Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katholik, Pembimbing Masyarakat Hindhu, Pembimbing Masyarakat dan Pembimbing Masyarakat Buddha, yang didukung oleh Tim nya masing-masing, sedangkan Untuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dimasukkan dalam target Kinerja, karena sudah pisah menjadi Kementerian tersendiri.
2. Penentuan Target Indikator Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mempertimbangkan target yang ditentukan oleh masing-masing direktoral di Eselon-1 juga mempertimbangkan target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur sebanyak 38 Satker Kankemenag dan 198 Satker MTsN dan 91 Satker MAN.

3. Tabel Target Kinerja meliputi tiga bidang, Yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola, sebagai berikut :
- a. SK / IKSK
 - b. Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator.
 - c. Satuan
 - d. Baseline 2024
 - e. Target Kinerja Tahun : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
 - f. Unit Organisasi Pelaksana.

Lebih detil diuraian pada tabel berikut ini :

Target Kinerja Tahun 2025 – 2029

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
BIDANG AGAMA					
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama				KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	76,47	83,8	
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0	95,5	
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	34,27	56,84	
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	32,275	40,5	
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	6,5	9,4	
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	34,43	46,5	
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak				Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	82	87,5	
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	01:05	01:05	
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	70	48,5	
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,4	4,9	
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	16,4	19,5	
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	17,3	19,4	
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	40,5	60,5	
IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	31,5	48,5	
IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	31,77	42,5	
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen		6,5	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	7,5	35,5	
IKSK.2.12	Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan Agama Islam	Persen	100	100	
IKSK.2.13	Persentase KUA Berdaya (Excelent)	Persen	0,00%	0,15%	
IKSK.2.14	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen	8,45	100	
IKSK.2.15	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	Persen	#FIELD!	3.05	
IKSK.2.16	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	Persen	12,1	69,57	
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.				Bid. PHU
IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	5,00	-	
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.				Bid. PHU
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	80,00	-	
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu			-	
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.				Bid. PHU
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	87,50	-	
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji.				Bid. PHU
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	80,00	-	
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	70,00	-	
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah				
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen			Bid. PHU

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;		72,05	-	
	b. Lembaga penyelenggara umrah		86,01	-	
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH					
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan				Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persen			
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas				Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	20,5	43,2	
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	40,5	67,5	
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	19,98	46,6	
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah			
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.				Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:				
	a literasi membaca		90,23	90,75	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas
	b numerasi		93,69	94,32	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	30,5	54,5	Buddha
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	54,4	71,14	
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah			
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	20,5	23,99	
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	27,6	53,7	
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen			
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	2,8	2,4	
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen			
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,18	0,72	
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen			
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	13,78	33,7	
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan.				Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	15,25	58,37	
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	01:13	01:15	
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	43,4	45,52	
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	38,1	79,81	
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	10,5	40,52	
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen			Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	24,7	24,25	Buddha
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen			
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen		13,33	
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen			
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen		30,33	
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	26,14	70,79	
BIDANG TATA KELOLA					
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran				Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	92,72	92,51	
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi				Sekretariat/TU : Tim Ortala
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen		78,78	
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai		33,95	
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN				Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		78,33	
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen		77,19	
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,33	99,8	
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen		99,9	
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	70,11	80,33	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).				Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	56,18	66,07	
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen		80,89	
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Jumlah		5	
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum				Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	95	96,43	
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	76,15	78,32	
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa				Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	45	69,3	
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	65,97	80,89	
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi				Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	56,5	69,82	
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	24,5		
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi				Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2.05		
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2,11	2,88	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA 2029	UNIT ORGANISASI PELAKSANA
1	2	3	4	5	6
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan				
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	72,5	76,63	Sekretariat/TU : Tim Terkait
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,36	2,2	
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10	15	
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen		23,03	
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	65,05	75	
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen		79,67	
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		93,51	

3.2. Kerangka Pendanaan

Pentuan Kerangka Pendanaan meliputi penggabungan semua Unit Organisasi .

1. Tingkat Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mulai Dari Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan pondok Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katholik, Pembimbing Masyarakat Hindhu, Pembimbing Masyarakat dan Pembimbing Masyarakat Buddha.
2. Tingkat Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se-Jawa Timur sebanyak 38 Satker Kankemenag dan 198 Satker MTsN dan 91 Satker MAN.
3. Unit Organisasi dan Program meliputi :
 - Sekretariat Jenderal
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Pendidikan Islam
 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Dukungan Manajemen
 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen

Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu

- Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Program Dukungan Manajemen

Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha

- Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
- Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
- Program Dukungan Manajemen

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah

- Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- Program Dukungan Manajemen

4. Adapun Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana terlampir, dibawah ini :

Kerangka Pendanaan Tingkat Kanwi dan Satker Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Timur

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
025	KEMENTERIAN AGAMA (PROVINSI JAWA TIMUR)	6.700.138.942.000	7.035.145.889.100	7.386.903.183.555	7.756.248.342.733	8.144.060.759.869	37.022.497.117.257
025.01	Sekretariat Jenderal	3.871.639.608.000	4.065.221.588.400	4.268.482.667.820	4.481.906.801.211	4.706.002.141.272	21.393.252.806.703
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.201.150.000	3.361.207.500	3.529.267.875	3.705.731.269	3.891.017.832	17.688.374.476
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	190.000.000	199.500.000	209.475.000	219.948.750	230.946.188	1.049.869.938
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	3.011.150.000	3.161.707.500	3.319.792.875	3.485.782.519	3.660.071.645	16.638.504.538
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33.000.000	34.650.000	36.382.500	38.201.625	40.111.706	182.345.831
5621	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	33.000.000	34.650.000	36.382.500	38.201.625	40.111.706	182.345.831
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.868.405.458.000	4.061.825.730.900	4.264.917.017.445	4.478.162.868.317	4.702.071.011.733	21.375.382.086.395
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	307.937.000	323.333.850	339.500.543	356.475.570	374.299.348	1.701.546.310
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	940.681.000	987.715.050	1.037.100.803	1.088.955.843	1.143.403.635	5.197.856.330
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	540.170.222.000	567.178.733.100	595.537.669.755	625.314.553.243	656.580.280.905	2.984.781.459.003
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	382.904.000	402.049.200	422.151.660	443.259.243	465.422.205	2.115.786.308
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	763.170.000	801.328.500	841.394.925	883.464.671	927.637.905	4.216.996.001
2103	Pembinaan Administrasi Umum	37.154.248.000	39.011.960.400	40.962.558.420	43.010.686.341	45.161.220.658	205.300.673.819
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	356.487.000	374.311.350	393.026.918	412.678.263	433.312.177	1.969.815.707
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	3.288.329.809.000	3.452.746.299.450	3.625.383.614.423	3.806.652.795.144	3.996.985.434.901	18.170.097.952.917
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	188.122.265.000	197.528.378.250	207.404.797.163	217.775.037.021	228.663.788.872	1.039.494.266.305
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	149.095.419.000	156.550.189.950	164.377.699.448	172.596.584.420	181.226.413.641	823.846.306.458
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	94.675.119.000	99.408.874.950	104.379.318.698	109.598.284.632	115.078.198.864	523.139.796.144
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	2.934.300.000	3.081.015.000	3.235.065.750	3.396.819.038	3.566.659.989	16.213.859.777
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	48.265.000.000	50.678.250.000	53.212.162.500	55.872.770.625	58.666.409.156	266.694.592.281
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	3.221.000.000	3.382.050.000	3.551.152.500	3.728.710.125	3.915.145.631	17.798.058.256
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	39.026.846.000	40.978.188.300	43.027.097.715	45.178.452.601	47.437.375.231	215.647.959.847

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	39.026.846.000	40.978.188.300	43.027.097.715	45.178.452.601	47.437.375.231	215.647.959.847
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	2.576.035.465.000	2.704.837.238.250	2.840.079.100.163	2.982.083.055.171	3.131.187.207.929	14.234.222.066.512
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	494.374.164.000	519.092.872.200	545.047.515.810	572.299.891.601	600.914.886.181	2.731.729.329.791
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	12.920.000.000	13.566.000.000	14.244.300.000	14.956.515.000	15.704.340.750	71.391.155.750
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	481.454.164.000	505.526.872.200	530.803.215.810	557.343.376.601	585.210.545.431	2.660.338.174.041
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.004.715.047.000	2.104.950.799.350	2.210.198.339.318	2.320.708.256.283	2.436.743.669.098	11.077.316.111.048
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	86.917.078.000	91.262.931.900	95.826.078.495	100.617.382.420	105.648.251.541	480.271.722.355
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	1.894.217.969.000	1.988.928.867.450	2.088.375.310.823	2.192.794.076.364	2.302.433.780.182	10.466.750.003.818
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	23.580.000.000	24.759.000.000	25.996.950.000	27.296.797.500	28.661.637.375	130.294.384.875
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	76.946.254.000	80.793.566.700	84.833.245.035	89.074.907.287	93.528.652.651	425.176.625.673
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	76.946.254.000	80.793.566.700	84.833.245.035	89.074.907.287	93.528.652.651	425.176.625.673
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	5.033.130.000	5.284.786.500	5.549.025.825	5.826.477.116	6.117.800.972	27.811.220.413
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.656.000.000	1.738.800.000	1.825.740.000	1.917.027.000	2.012.878.350	9.150.445.350
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.656.000.000	1.738.800.000	1.825.740.000	1.917.027.000	2.012.878.350	9.150.445.350
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	1.276.630.000	1.340.461.500	1.407.484.575	1.477.858.804	1.551.751.744	7.054.186.623
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	1.276.630.000	1.340.461.500	1.407.484.575	1.477.858.804	1.551.751.744	7.054.186.623
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.403.000.000	1.473.150.000	1.546.807.500	1.624.147.875	1.705.355.269	7.752.460.644
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	1.403.000.000	1.473.150.000	1.546.807.500	1.624.147.875	1.705.355.269	7.752.460.644
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	697.500.000	732.375.000	768.993.750	807.443.438	847.815.609	3.854.127.797
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	140.000.000	147.000.000	154.350.000	162.067.500	170.170.875	773.588.375
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	557.500.000	585.375.000	614.643.750	645.375.938	677.644.734	3.080.539.422
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	5.558.543.000	5.836.470.150	6.128.293.658	6.434.708.340	6.756.443.757	30.714.458.905

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.326.880.000	2.443.224.000	2.565.385.200	2.693.654.460	2.828.337.183	12.857.480.843
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2.326.880.000	2.443.224.000	2.565.385.200	2.693.654.460	2.828.337.183	12.857.480.843
025.06. WA	Program Dukungan Manajemen	488.135.000	512.541.750	538.168.838	565.077.279	593.331.143	2.697.254.010
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	488.135.000	512.541.750	538.168.838	565.077.279	593.331.143	2.697.254.010
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	33.153.788
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	33.153.788
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.290.423.000	2.404.944.150	2.525.191.358	2.651.450.925	2.784.023.472	12.656.032.905
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	2.290.423.000	2.404.944.150	2.525.191.358	2.651.450.925	2.784.023.472	12.656.032.905
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	447.105.000	469.460.250	492.933.263	517.579.926	543.458.922	2.470.537.360
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	447.105.000	469.460.250	492.933.263	517.579.926	543.458.922	2.470.537.360
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu	5.017.500.000	5.268.375.000	5.531.793.750	5.808.383.438	6.098.802.609	27.724.854.797
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.770.645.000	2.909.177.250	3.054.636.113	3.207.367.918	3.367.736.314	15.309.562.595
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	2.770.645.000	2.909.177.250	3.054.636.113	3.207.367.918	3.367.736.314	15.309.562.595
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	706.750.000	742.087.500	779.191.875	818.151.469	859.059.042	3.905.239.886
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	706.750.000	742.087.500	779.191.875	818.151.469	859.059.042	3.905.239.886
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	993.305.000	1.042.970.250	1.095.118.763	1.149.874.701	1.207.368.436	5.488.637.149
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	993.305.000	1.042.970.250	1.095.118.763	1.149.874.701	1.207.368.436	5.488.637.149
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	546.800.000	574.140.000	602.847.000	632.989.350	664.638.818	3.021.415.168
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	451.520.000	474.096.000	497.800.800	522.690.840	548.825.382	2.494.933.022
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	95.280.000	100.044.000	105.046.200	110.298.510	115.813.436	526.482.146
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	5.201.394.000	5.461.463.700	5.734.536.885	6.021.263.729	6.322.326.916	28.740.985.230
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.904.100.000	1.999.305.000	2.099.270.250	2.204.233.763	2.314.445.451	10.521.354.463
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	1.904.100.000	1.999.305.000	2.099.270.250	2.204.233.763	2.314.445.451	10.521.354.463

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	1.345.700.000	1.412.985.000	1.483.634.250	1.557.815.963	1.635.706.761	7.435.841.973
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	1.345.700.000	1.412.985.000	1.483.634.250	1.557.815.963	1.635.706.761	7.435.841.973
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.309.094.000	1.374.548.700	1.443.276.135	1.515.439.942	1.591.211.939	7.233.570.716
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	1.309.094.000	1.374.548.700	1.443.276.135	1.515.439.942	1.591.211.939	7.233.570.716
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	642.500.000	674.625.000	708.356.250	743.774.063	780.962.766	3.550.218.078
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	142.500.000	149.625.000	157.106.250	164.961.563	173.209.641	787.402.453
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125	2.762.815.625
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	43.531.037.000	45.707.588.850	47.992.968.293	50.392.616.707	52.912.247.542	240.536.458.392
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	37.373.366.000	39.242.034.300	41.204.136.015	43.264.342.816	45.427.559.957	206.511.439.087
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	129.874.000	136.367.700	143.186.085	150.345.389	157.862.659	717.635.833
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	14.907.671.000	15.653.054.550	16.435.707.278	17.257.492.641	18.120.367.273	82.374.292.742
2148	Pembinaan Haji	22.335.821.000	23.452.612.050	24.625.242.653	25.856.504.785	27.149.330.024	123.419.510.512
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	6.157.671.000	6.465.554.550	6.788.832.278	7.128.273.891	7.484.687.586	34.025.019.305
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	6.157.671.000	6.465.554.550	6.788.832.278	7.128.273.891	7.484.687.586	34.025.019.305

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2025 ini disusun dengan seksama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis bagi unit kerja khususnya unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Agama. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan serta bagi unit kerja yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk menyusun Rencana Program Kerja sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang terstruktur.

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia atas bimbingannya dalam Menyusun Renstra ini. Dan kami juga menymapikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan baik. Semoga dengan Rencana Strategis ini dapat menjadikan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik. Aamiin..

Sidoarjo, 15 Desember 2025.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur



Akhmad Sruji Bahtiar
NIP. 197204122000031002

LAMPIRAN :

Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	BIDANG AGAMA													
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam								188.122.265.000	197.528.378.250	207.404.797.163	217.775.037.021	228.663.788.872	
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								149.095.419.000	156.550.189.950	164.377.699.448	172.596.584.420	181.226.413.641	
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah								94.675.119.000	99.408.874.950	104.379.318.698	109.598.284.632	115.078.198.864	
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf								2.934.300.000	3.081.015.000	3.235.065.750	3.396.819.038	3.566.659.989	
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam								48.265.000.000	50.678.250.000	53.212.162.500	55.872.770.625	58.666.409.156	
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah								3.221.000.000	3.382.050.000	3.551.152.500	3.728.710.125	3.915.145.631	
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen								39.026.846.000	40.978.188.300	43.027.097.715	45.178.452.601	47.437.375.231	
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam								39.026.846.000	40.978.188.300	43.027.097.715	45.178.452.601	47.437.375.231	
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen								5.033.130.000	5.284.786.500	5.549.025.825	5.826.477.116	6.117.800.972	
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								1.656.000.000	1.738.800.000	1.825.740.000	1.917.027.000	2.012.878.350	
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen								1.656.000.000	1.738.800.000	1.825.740.000	1.917.027.000	2.012.878.350	
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik								5.558.543.000	5.836.470.150	6.128.293.658	6.434.708.340	6.756.443.757	
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								2.326.880.000	2.443.224.000	2.565.385.200	2.693.654.460	2.828.337.183	
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik								2.326.880.000	2.443.224.000	2.565.385.200	2.693.654.460	2.828.337.183	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
025.06. WA	Program Dukungan Manajemen								488.135.000	512.541.750	538.168.838	565.077.279	593.331.143	
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik								488.135.000	512.541.750	538.168.838	565.077.279	593.331.143	
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu								5.017.500.000	5.268.375.000	5.531.793.750	5.808.383.438	6.098.802.609	
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								2.770.645.000	2.909.177.250	3.054.636.113	3.207.367.918	3.367.736.314	
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu								2.770.645.000	2.909.177.250	3.054.636.113	3.207.367.918	3.367.736.314	
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha								5.201.394.000	5.461.463.700	5.734.536.885	6.021.263.729	6.322.326.916	
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								1.904.100.000	1.999.305.000	2.099.270.250	2.204.233.763	2.314.445.451	
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha								1.904.100.000	1.999.305.000	2.099.270.250	2.204.233.763	2.314.445.451	
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama													
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	76,47	83,00	83,20	83,40	83,60	83,80						
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0		33,80	50,70	67,60	100,00						
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	34,27	44,45	53,90	53,93	55,10	56,84						
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERAN I/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	32,275	36,5	37,5	38,5	39,5	40,5						
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	6,5	9	9,1	9,2	9,3	9,4						
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola	Persen	34,43	35,5	39,5	40,5	43,5	46,5						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	kelembagaan													
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak													
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	82,00	84,50	85,5	86,5	86,59	87,50						
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5	1 : 5						
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	70	44,5	45,4	46,7	47,5	48,5						
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,4	4,1	4,3	4,5	4,6	4,9						
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	16,4	17,5	18,4	18,8	19,3	19,5						
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	17,3	18,2	18,5	19,2	19,5	19,4						
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	40,5	45,5	50,5	55,8	58,5	60,5						
IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	31,5	32,5	33,5	36,5	45,5	48,5						
IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	31,77	16,5	25,5	30,4	37,5	42,5						
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen		0,84	1,5	3,4	4,2	6,5						
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	7,5	9,2	15,5	22,5	29,5	35,5						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah								43.531.037.000	45.707.588.850	47.992.968.293	50.392.616.707	52.912.247.542	
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								37.373.366.000	39.242.034.300	41.204.136.015	43.264.342.816	45.427.559.957	
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus								129.874.000	136.367.700	143.186.085	150.345.389	157.862.659	
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri								14.907.671.000	15.653.054.550	16.435.707.278	17.257.492.641	18.120.367.273	
2148	Pembinaan Haji								22.335.821.000	23.452.612.050	24.625.242.653	25.856.504.785	27.149.330.024	
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen								6.157.671.000	6.465.554.550	6.788.832.278	7.128.273.891	7.484.687.586	
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah								6.157.671.000	6.465.554.550	6.788.832.278	7.128.273.891	7.484.687.586	
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													
IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen		5,00										
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji													
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen		80,00										
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu			86,00										
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen		87,50										
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji													
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen		80,00										
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat	Persen		70,00										

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	manasik haji													
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah													
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen												
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;			82,05										
	b. Lembaga penyelenggara umrah			96,01										
BIDANG PENDIDIK AN														
025.04	Ditjen Pendidikan Islam								2.576.035.465.000	2.704.837.238.250	2.840.079.100.163	2.982.083.055.171	3.131.187.207.929	
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun								494.374.164.000	519.092.872.200	545.047.515.810	572.299.891.601	600.914.886.181	
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam								12.920.000.000	13.566.000.000	14.244.300.000	14.956.515.000	15.704.340.750	
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah								481.454.164.000	505.526.872.200	530.803.215.810	557.343.376.601	585.210.545.431	
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								2.004.715.047.000	2.104.950.799.350	2.210.198.339.318	2.320.708.256.283	2.436.743.669.098	
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam								86.917.078.000	91.262.931.900	95.826.078.495	100.617.382.420	105.648.251.541	
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah								1.894.217.969.000	1.988.928.867.450	2.088.375.310.823	2.192.794.076.364	2.302.433.780.182	
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam								23.580.000.000	24.759.000.000	25.996.950.000	27.296.797.500	28.661.637.375	
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen								76.946.254.000	80.793.566.700	84.833.245.035	89.074.907.287	93.528.652.651	
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam								76.946.254.000	80.793.566.700	84.833.245.035	89.074.907.287	93.528.652.651	
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (KRISTEN)								1.276.630.000	1.340.461.500	1.407.484.575	1.477.858.804	1.551.751.744	

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen								1.276.630.000	1.340.461.500	1.407.484.575	1.477.858.804	1.551.751.744	
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								1.403.000.000	1.473.150.000	1.546.807.500	1.624.147.875	1.705.355.269	
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen								1.403.000.000	1.473.150.000	1.546.807.500	1.624.147.875	1.705.355.269	
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen								697.500.000	732.375.000	768.993.750	807.443.438	847.815.609	
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen								140.000.000	147.000.000	154.350.000	162.067.500	170.170.875	
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen								557.500.000	585.375.000	614.643.750	645.375.938	677.644.734	
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (KATHOLIK)								6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik								6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								2.290.423.000	2.404.944.150	2.525.191.358	2.651.450.925	2.784.023.472	
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik								2.290.423.000	2.404.944.150	2.525.191.358	2.651.450.925	2.784.023.472	
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen								447.105.000	469.460.250	492.933.263	517.579.926	543.458.922	
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik								447.105.000	469.460.250	492.933.263	517.579.926	543.458.922	
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (HINDHU)								706.750.000	742.087.500	779.191.875	818.151.469	859.059.042	
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu								706.750.000	742.087.500	779.191.875	818.151.469	859.059.042	
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								993.305.000	1.042.970.250	1.095.118.763	1.149.874.701	1.207.368.436	
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu								993.305.000	1.042.970.250	1.095.118.763	1.149.874.701	1.207.368.436	
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen								546.800.000	140.000	602.847.000	632.989.350	664.638.818	
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu								451.520.000	474.096.000	497.800.800	522.690.840	548.825.382	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu								95.280.000	100.044.000	105.046.200	110.298.510	115.813.436	
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (BUDDHA)								1.345.700.000	1.412.985.000	1.483.634.250	1.557.815.963	1.635.706.761	
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha								1.345.700.000	1.412.985.000	1.483.634.250	1.557.815.963	1.635.706.761	
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								1.309.094.000	1.374.548.700	1.443.276.135	1.515.439.942	1.591.211.939	
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha								1.309.094.000	1.374.548.700	1.443.276.135	1.515.439.942	1.591.211.939	
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen								642.500.000	674.625.000	708.356.250	743.774.063	780.962.766	
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha								142.500.000	149.625.000	157.106.250	164.961.563	173.209.641	
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha								500.000.000	525.000.000	551.250.000	578.812.500	607.753.125	
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan													
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan agama, satuan kekhlasan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren dengan predikat yang lulus sangat baik	Persen												
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan yang berkualitas keagamaan													
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhlasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	20,5	33,5	35,5	37,5	40,4	43,2						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	40,5	52,5	58,5	60,5	64,5	67,5						
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah												
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	-												
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:													
	a literasi membaca		90,23	90,25	90,38	90,5	90,63	90,75						
	b numerasi		93,69	93,82	93,94	94,07	94,19	94,32						
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	30,5	33,6	40,5	45,5	50,6	54,5						
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	54,4	63,5	65,5	67,2	69,2	71,14						
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah												
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	20,5	22,83	23,13	23,44	23,71	23,99						
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	27,6	23,8	47,03	49,22	50,46	53,7						

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen												
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	2,8	2,17	2,54	2	2,18	2,4						
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen												
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,18	0,47	0,49	0,62	0,65	0,72						
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen												
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen		14,78	20,89	26,87	28,65	33,7						
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan													
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	15,25	16,26	41,5	48,82	53,8	58,37						
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 : 13	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14	1 : 15						
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	43,4	34,5	34,37	36,06	40,81	45,52						
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	38,1	38,8	54,54	65,37	72,48	79,81						
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	10,5	10,5	11,5	19,68	29,27	40,52						
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen												
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	24,7	15,78	17,89	19	22,12	24,25						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen												
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen		5,3	7,31	9,32	11,32	13,33						
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen												
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen		51,9	54,83	41,16	38,33	30,33						
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	26,14	33,95	51,44	52,3	53,19	70,79						
BIDANG TATA KELOLA														
025.01	Sekretariat Jenderal								3.871.639.608.000	4.065.221.588.400	4.268.482.667.820	4.481.906.801.211	4.706.002.141.272	
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								3.201.150.000	3.361.207.500	3.529.267.875	3.705.731.269	3.891.017.832	
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu								190.000.000	199.500.000	209.475.000	219.948.750	230.946.188	
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama								3.011.150.000	3.161.707.500	3.319.792.875	3.485.782.519	3.660.071.645	
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								33.000.000	34.650.000	36.382.500	38.201.625	40.111.706	
5621	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu								33.000.000	34.650.000	36.382.500	38.201.625	40.111.706	
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen								3.868.405.458.000	4.061.825.730.900	4.264.917.017.445	4.478.162.868.317	4.702.071.011.733	
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN								307.937.000	323.333.850	339.500.543	356.475.570	374.299.348	
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum													
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	95,00	95,00	95,71	96,00	96,29	96,43						
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	76,15	77,15	77,44	77,74	78,03	78,32						

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian								940.681.000	987.715.050	1.037.100.803	1.088.955.843	1.143.403.635	
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)													
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	56,18	62,29	63,35	64,40	65,36	66,07						
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen		65,97	69,73	73,28	77,24	80,89						
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi	Jumlah												
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN								540.170.222.000	567.178.733.100	595.537.669.755	625.314.553.243	656.580.280.905	
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa													
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	45	46,2	53,8	59,7	66	69,3						
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen												
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana								382.904.000	402.049.200	422.151.660	443.259.243	465.422.205	
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi													
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen		75	76,08	77,17	78,03	78,78						
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai		25,29	26,20	27,12	28,03	33,95						
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan								763.170.000	801.328.500	841.394.925	883.464.671	927.637.905	
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran													
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	92,72	91,84	92	92,17	92,34	92,51						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2103	Pembinaan Administrasi Umum								37.154.248.000	39.011.960.400	40.962.558.420	43.010.686.341	45.161.220.658	
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN													
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		77,14	77,40	77,72	78,06	78,33						
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen		68,19	69,68	71,99	74,41	77,19						
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,33	93,65	95,24	96,83	98,41	99,80						
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	98,5	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9						
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	70,11	70,33	71,86	75,39	78,03	80,33						
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan								356.487.000	374.311.350	393.026.918	412.678.263	433.312.177	
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi													
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	56,5	57,27	65,82	67,19	68,56	69,82						
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	24,5											
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi													
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,05											
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2,11	2,12	2,33	2,63	2,75	2,88						
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan								3.288.329.809.000	3.452.746.299.450	3.625.383.614.423	3.806.652.795.144	3.996.985.434.901	
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan													
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	72,5	73,60	74,95	75,79	76,13	76,63						
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,36	1,67	1,97	2,00	2,14	2,20						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00						
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen		22,58	21,08	21,77	21,97	23,03						
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	65,05	68,60	70,80	73,00	74,00	75,00						
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen		69,34	71,22	72,39	75,91	79,67						
IKSK.20.7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		92,84	93	93,17	93,34	93,51						

Lampiran II : Metadata

BIDANG AGAMA		
Metadata IKSK.1.1. : Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi.		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
3	Konsep/Definisi	: Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	: $\text{Persentase} = (\text{Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi} \div \text{Jumlah total provinsi}) \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi 2. Jumlah total provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	: Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
11	Level Estimasi	: Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

Metadata IKS.1.2 : Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	: Kementerian Agama
2	Nama Indikator	: Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	: Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	: Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	: Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA secara nasional
6	Nama Variabel Pembangun	: 1. Persentase KUA penyelenggara Early Warning System
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	: 1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4 Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	: Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	: Tahunan
10	Klasifikasi	: 1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra
11	Level Estimasi	: 1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	: Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	: -

IKSK.1.3 : Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi	Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi	Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota). 2. Tingkat provinsi. 3. Tingkat nasional
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.1.4 : Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital
5	Metode / Rumus Perhitungan	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Audiens Langsung (Luring). 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.1.5 : Persentase peningkatan peserta event seni budaya

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.1.6 : Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan. 2). Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan. 3). Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.1 : Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.2 : Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi	pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.3 : Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.4 : Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
3	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan penyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator. 2). Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Eselon I
11	Level Estimasi	1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.5 : Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.6. : -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
3	Konsep/Definisi	Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasaranan b = KUA seluruh indonesia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah KUA
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembangunan KUA melalui SBSN 2. Revitalisasi KUA
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Perhitungan Prioritas : 1. Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag 2. Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab 3. Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.7 : Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Persentase
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.8 : Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci . 2). Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online. 3). Fasilitasi Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci. 4). Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan. 5). Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.9 : Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang layak edar/sesuai kaidah
3	Konsep/Definisi	Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai-nilai moderasi, serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Kelayakan Naskah dan Buku Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama dan BPJPH
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.11 : Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahik yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2). Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional. 3). Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional. 4). Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik. 5). Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1). Mustahik zakat 2). Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase Calon Pengantin yang Mendapatkan Bimbingan Perkawinan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/ Khonghucu
3	Konsep/Definisi	Persentase catin yang mendapatkan bimbingan perkawinan merujuk pada persentase dari calon pengantin (catin) yang telah menerima panduan atau bimbingan khusus mengenai perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan. Bimbingan perkawinan dapat mencakup aspek-aspek seperti kesiapan mental, tanggung jawab dalam pernikahan, keseimbangan peran suami-istri, serta informasi hukum dan agama terkait pernikahan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi Catin dalam Blmwin, menandakan semakin besar peran pemerintah dalam memfasilitasi bimwin bagi para Catin
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah calon pengantin yang mendapatkan Bimwin b = Jumlah calon pengantin yang terdaftar
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan 2. Jumlah calon pengantin yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pengembangan kurikulum dan modul bimbingan perkawinan 2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga pembimbing perkawinan 3. Evaluasi efektivitas program bimbingan perkawinan 4. Survei kepuasan peserta bimbingan perkawinan 5. Penyediaan sarana dan media pendukung bimbingan perkawinan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Bimbingan 2. Pembinaan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Persentase KUA Berdaya.		
No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase KUA Berdaya.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi kategori "Berdaya" berdasarkan penilaian kinerja, pelayanan, dan inovasi. Kategori "Excellent" ditetapkan melalui evaluasi terhadap standar layanan administrasi, pembinaan umat, pemanfaatan teknologi, serta pemenuhan sarana dan prasarana.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang berada pada kategori "Excellent", semakin baik kinerja KUA dalam memberikan layanan publik keagamaan yang profesional, responsif, dan inovatif. Angka ini juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan dan penguatan kelembagaan KUA di berbagai daerah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah KUA yang memperoleh kategori "Berdaya (Excellent)" berdasarkan hasil evaluasi b = Jumlah total KUA yang dievaluasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja KUA berdasarkan instrumen penilaian berdaya (Excellent) 2. Jumlah total KUA yang dievaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi dan Penetapan KUA Berdaya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kategori hasil evaluasi: Excellent (Berdaya), Baik, Cukup, Kurang
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana.		
No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana.
3	Konsep/Definisi	Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasaranan b = KUA seluruh indonesia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah KUA
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembangunan KUA melalui SBSN 2. Revitalisasi KUA
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Perhitungan Prioritas : 1. Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag 2. Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab 3. Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah.		
No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah.
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi.		
No	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
2	Nama Indikator	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi.
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

BIDANG PENDIDIKAN

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029

IKSK.4.2 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a) = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana. b) = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.11 : Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.12 : Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan. 2). Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru 2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.7 : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.2 : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.3 : Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi. b) = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.5 : Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.6 : Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

ISK.6.8 : Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.9 : Persentase guru yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.10 : Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.1 : Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a). literasi membaca. b). numerasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = $(\sum \text{skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

IKSK.5.2 : Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.3 : Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.5 : Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.6 : Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.12 : Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Raudhatul Athfal (RA) yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi yang berwenang.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya PAUD/RA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan minimal sesuai peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha terakreditasi minimal B 2. Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan dasar berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang dasar tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan menengah pertama berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang menengah pertama tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak MA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan kriteria minimal peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B 2. Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.8 : Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.9 : Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah madrasah
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.10 : Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.11 : Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

A. BIDANG TATA KELOLA

IKSK.7.1 : Nilai Kinerja Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rencana Anggaran. 2). Realisasi Anggaran. 3). Output. 4). Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Perencanaan Anggaran. 2). Pelaksanaan Anggaran. 3). Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.8.1 : Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.8.2 : Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal RB Nasional

IKSK.9.1 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
4	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b. baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; c. cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Wilayah 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya)	Website Kemenkeu

IKSK.9.2 : Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep/Definisi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kementerian 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.3 : Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN dan Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN pada Kementerian Agama, Eselon I Pusat, Kantor Wilayah
11	Level Estimasi	1. Kementerian Agama, 2. Eselon I, 3. Kantor Wilayah, 4 Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.4 : Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.5 : Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara / Tata Kelola Aset / Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.1 : Indeks Profesionalisme ASN		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BKN
2	Nama Indikator	Indeks Profesionalisme ASN
3	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkat Presentasi SMART dan Moderat Religius ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
6	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.2 : Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB dan BKN
2	Nama Indikator	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
3	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.3 : Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama melibatkan Stakeholder KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
3	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
4	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag
6	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.11.1 : Persentase kasus hukum yang terselesaikan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah peraturan 2. Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1). Kasus Sengketa tanah. 2). Kasus hukum ASN
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. PTKN 4. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK.11.2 : Persentase rekomendasi izin orang asing		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi izin orang asing
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan keagamaan atau pendidikan atau orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan ke luar negeri dalam suatu periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin cepat dan efektif proses pengambilan keputusan terkait izin orang asing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a). Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan. B). Jumlah rekomendasi izin orang asing
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian. 10). Izin Studi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Regulasi 2. Penyusunan SOP 3. Penerbitan rekomendasi 4. Monev
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis izin: 1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian.. 10). Izin Studi
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK. 12.1 : Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK. 12.2 : Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
3	Konsep/Definisi	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangun	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Laporan pembangunan, 2). roadmap pengembangan, data aset perkantoran. 3). sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	1). $\geq 80\%$ → Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2). $60\% - 79\%$ → Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3). $40\% - 59\%$ → Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4). $20\% - 39\%$ → Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5). $< 20\%$ → Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	1). Kementerian 2). Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK.13.1 : Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangun	1). Kebijakan dan Regulasi . 2). Struktur Organisasi dan SDM PPID . 3).Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik. 4). Layanan Informasi Publik. 5). Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi. 6).Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja 2. Pembinaan/Pelatihan 3. Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Sangat Maju → PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. 2. Maju → PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. 3. Berkembang → PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi. 4. Dasar → PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. 5. Belum Berkembang → PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	1). Kementerian. 2). Unit Eselon I. 3). Kanwil Kementerian Agama Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.2 : Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.1 : Indeks Pembangunan Statistik		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BPS
2	Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik Kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu Kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangun	1). Prinsip SDI. 2). Kualitas Data. 3). Proses Bisnis Statistik. 4). Kelembagaan; dan 5). Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama 2. Penyusunan data Statistik 3. Penguatan jabatan fungsional statistisi 4. Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Portal BPS

IKSK.15.1 : Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.2 : Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan kinerja Kementerian Agama dari tahun ke tahun berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.3 : Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

IKSK.15.4 : Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.5 : Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.6 : Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
6	Nama Variabel Pembangunan	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.7 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-